

**PENGARUH STATUS KEANGGOTAAN KOPERASI ISM
MITRA KARYA BAHARI TERHADAP PENDAPATAN
RUMAHTANGGA DAN KETAHANAN PANGAN
NELAYAN DI PULAU PASARAN BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

Oleh

AYU PERMATA PUTRI S.



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

THE EFFECT OF MEMBERSHIP STATUS OF ISM MITRA KARYA BAHARI COOPERATIVE ON HOUSEHOLD INCOME AND FISHERMAN'S FOOD SECURITY IN PASARAN ISLAND OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

Ayu Permata Putri S.

This research aims to determine: the amount and effect of membership status on fisherman's income, contribution of economic benefits on household income of fisherman, the amount and effect of membership status on household income of fisherman, the level and effect of membership status on fisherman's food security, and the factors that affect fisherman's food security. This research was conducted in Pasaran Island which most people are work as fishermen. The number of cooperative member respondents were 35 people, while the number of non-cooperative member respondents were 30 people. This research was conducted by survey method and the data was analyzed by income analysis, simple linear regression analysis and logistic regression analysis. The result showed that the income of catching fish business has different on east season, normal season, and west season. The income of fisherman's cooperative members was higher than non-fisherman's cooperative members because of the significant effect on membership status to fisherman's household income. The average household income of fisherman members from economic benefits cash value was 0.31 percent per year. The total household income of cooperative members was Rp31,752,000.00 per year, this was higher than non-cooperative members which was Rp23,226,426.67 per year. Therefore, membership status had significant effect on fisherman's household income. Fisherman's food security the most still on the low category. Income of fisherman and other income affect the food security significantly, while the membership status and economic benefit do not affect significantly.

Key words: food security, income, membership status.

ABSTRAK

PENGARUH STATUS KEANGGOTAAN KOPERASI ISM MITRA KARYA BAHARI TERHADAP PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAN KETAHANAN PANGAN NELAYAN DI PULAU PASARAN BANDAR LAMPUNG

Oleh

Ayu Permata Putri S.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: besar dan pengaruh status keanggotaan terhadap pendapatan usaha nelayan, kontribusi manfaat ekonomi terhadap pendapatan rumahtangga nelayan, besar dan pengaruh status keanggotaan terhadap pendapatan rumahtangga nelayan, tingkat dan pengaruh status keanggotaan terhadap ketahanan pangan nelayan, serta faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan nelayan. Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Pasaran yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Jumlah responden anggota koperasi sebanyak 35 orang, sedangkan jumlah responden non anggota koperasi sebanyak 30 orang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian survei dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pendapatan usaha ikan tangkap nelayan berbeda-beda pada musim timur, musim normal, dan musim barat, serta pendapatan usaha nelayan anggota koperasi lebih besar dibandingkan nelayan non anggota karena adanya pengaruh nyata dari status keanggotaan terhadap pendapatan usaha nelayan, rata – rata pendapatan rumahtangga nelayan anggota koperasi dari manfaat ekonomi tunai sebesar 0,31 persen per tahun, total pendapatan rumahtangga anggota koperasi sebesar Rp31.752.000,00 per tahun lebih besar dibandingkan non anggota koperasi sebesar Rp23.226.426,67 per tahun, maka status keanggotaan berpengaruh nyata terhadap pendapatan rumahtangga nelayan. Tingkat ketahanan pangan nelayan sebagian besar masih termasuk dalam kategori rendah. Pendapatan usaha nelayan dan pendapatan lain – lain berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan, sedangkan status keanggotaan dan manfaat ekonomi tidak berpengaruh nyata.

Kata kunci: ketahanan pangan, pendapatan, status keanggotaan

**PENGARUH STATUS KEANGGOTAAN KOPERASI ISM
MITRA KARYA BAHARI TERHADAP PENDAPATAN
RUMAHTANGGA DAN KETAHANAN PANGAN
NELAYAN DI PULAU PASARAN BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Ayu Permata Putri S.

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN**

Pada

**Jurusan Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi

**: PENGARUH STATUS KEANGGOTAAN
KOPERASI ISM MITRA KARYA BAHARI
TERHADAP PENDAPATAN RUMAH
TANGGA DAN KETAHANAN PANGAN
NELAYAN DI PULAU PASARAN BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: *Ayu Permata Putri S.*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1114131016

Jurusan/Program Studi

: Agribisnis

Fakultas

: Pertanian



1. Komisi Pembimbing

[Signature]
Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana L, M.Si.
NIP 19620918/198803 2 001

[Signature]
Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.
NIP 19590425 198403 2 001

2. Ketua Jurusan/Program Studi

[Signature]
Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P.
NIP 19630203 198902 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana L, M.Si.**

Sekretaris

: **Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc.**

2. Dekan Fakultas Pertanian



Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

NIP. 19611020 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Maret 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 07 Januari 1993, dari pasangan bapak OG. Suprpto dan ibu Zulfa, A.Ma. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan studi tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Al-Azhar II Bandar Lampung pada tahun 2005, tingkat pertama (SLTP) di SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2008, dan tingkat atas (SLTA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun 2011. Penulis diterima di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun 2011. Penulis pernah menjadi Asisten Dosen mata kuliah Koperasi pada semester genap tahun ajaran 2013/2014, mata kuliah Landasan Perdagangan Internasional pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 dan mata kuliah Ekonometrika pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015.

Pada tahun 2014, penulis melaksanakan Praktik Umum (PU) selama 40 hari di PT Laju Perdana Indah Site Komerling Sumatera Selatan dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

SANWACANA

Alhamdulillahillobbil 'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasehat, serta saran - saran yang membangun. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga nilainya kepada :

1. Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana Lestari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menjadi sosok seorang ibu untuk di kampus dengan memberikan motivasi, bimbingan, saran serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Ir. Kordiyana K. Ranga, M.S., selaku Dosen Pembimbing ke Dua yang telah menjadi sosok seorang ibu untuk di kampus dengan memberikan motivasi, bimbingan, saran serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. Ir. Sumaryo GS, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan, saran serta nasehat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ayah Bundaku tercinta OG. Suprpto dan Zulfa A.Ma yang sangat mempengaruhi kehidupanku atas doa, kasih sayang dan arahan kehidupan yang telah diberikan.
6. Kandaku Fajar Agviola Putra dan adikku Bella Husna Safitri yang selalu menemaniku dan memberikan motivasi serta doanya.
7. Dr. Ir. F. E. Prasmatiwi, M.P., selaku Ketua Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
8. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
9. Pengurus, Karyawan, Anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari dan nelayan Pulau Pasaran atas informasi dan kerjasama yang telah diberikan.
10. Seluruh Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Karyawan - karyawan di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Mba Ayi, Mba Iin, Mba Fitri, Mas Bukhari, Mas Boim, dan Mas Sukardi atas semua bantuan yang telah diberikan.
12. Teman bermain dan belajar semasa kuliah: Clara Yolandika, Dian Martiani, Haliana Ghaida, Intan Thahara Putri, Adiguna Gadung, Aldino Ahmad, Fergany Wicaksana, Muhammad Azmi, dan M. Yanuar Rizaldi atas motivasi serta kebersamaan yang telah diberikan.
13. Teristimewa Prajurit Dua Satria Bayu Aji yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan setia menemaniku disaat aku merasa penat dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 2011: Viranita, Fachira, Elsa, Wigeta, Eni, Awi, Elvany, Nani, Endah, Tiar, Dita, Niken, Furi, Ester, Bobi, Didit, Yuda, Gustam, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Sahabat tersayang: Dara, Desti, Serli, Ayu Lestari, Ika, Atig, Eno atas keceriaan dan kebersamaan yang telah diberikan saatku merasa penat mengerjakan skripsi ini.
16. Keluarga besar Agribisnis 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014.
17. Almamater dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Mohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kesalahan. Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung,

Penulis

Ayu Permata Putri S.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan Penelitian | 8 |
| C. Manfaat Penelitian | 9 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS | 10 |
| A. Tinjauan Pustaka | 10 |
| 1. Koperasi | 10 |
| a. Prinsip, Fungsi dan Peran Koperasi | 13 |
| b. Sifat Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi ... | 14 |
| c. Manfaat Ekonomi Koperasi | 19 |
| 2. Pendapatan Usaha Nelayan | 21 |
| 3. Pendapatan Rumahtangga | 22 |
| 4. Ketahanan Pangan | 25 |
| 5. Penelitian Terdahulu | 36 |
| B. Kerangka Pemikiran | 41 |
| C. Hipotesis | 45 |
| III. METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Rancangan Penelitian | 46 |
| B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional | 46 |
| C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian | 51 |
| D. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data | 53 |
| E. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis | 55 |
| 1. Analisis Pendapatan Usaha Nelayan | 55 |
| a. Pendapatan Usaha Nelayan | 55 |
| b. <i>Revenue Cost Ratio</i> | 56 |
| c. Pengujian Perbedaan Pendapatan Usaha Nelayan | 57 |
| 2. Manfaat Ekonomi Koperasi | 58 |
| 3. Analisis Pendapatan Rumahtangga | 58 |
| 4. Analisis Ketahanan Pangan | 60 |
| a. Uji Validitas dan Reliabiliats | 60 |

| | |
|--|-----------|
| 1). Validitas Instrumen | 60 |
| 2). Reliabilitas Instrumen | 62 |
| b. <i>Method of Succesive Interval</i> (MSI) | 63 |
| c. Pengukuran Ketahanan Pangan | 64 |
| d. Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruri Ketahanan Pangan | 67 |
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 71 |
| A. Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur | 71 |
| 1. Keadaan Georafis | 71 |
| 2. Keadaan Iklim | 72 |
| 3. Keadaan Umum Demografi | 72 |
| 4. Keadaan Umum Perikanan | 73 |
| B. Keadaan Umum Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur | 74 |
| 1. Keadaan Geografis | 74 |
| 2. Keadaan Iklim dan Demografi | 75 |
| C. Keadaan Umum Pulau Pasaran | 75 |
| 1. Keadaan Geografis | 75 |
| 2. Keadaan Iklim | 76 |
| 3. Topografi dan Demografi | 77 |
| 4. Sarana dan Prasarana | 78 |
| D. Keadaan Umum Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari | 79 |
| 1. Sejarah Koperasi | 79 |
| 2. Struktur Organisasi Koperasi | 82 |
| 3. Unit Usaha Koperasi | 85 |
| E. Keadaan Umum Ketahanan Pangan Nelayan | 86 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | 89 |
| A. Karakteristik Nelayan Responden | 89 |
| 1. Umur Nelayan Responden | 89 |
| 2. Tingkat Pendidikan Nelayan | 90 |
| 3. Jumlah Tanggungan Keluarga | 92 |
| 4. Jarak Dari Rumah ke Laut | 93 |
| 5. Usaha Lain-lain Nelayan | 94 |
| B. Penggunaan Input Produksi Usaha Ikan Tangkap Nelayan | 95 |
| 1. Jumlah Input Produksi dan Biaya Variabel | 96 |
| 2. Jumlah Input Produksi dan Biaya Tetap | 102 |
| C. Analisis Pendapatan Usaha Nelayan dan Pengaruh Status Keanggotaan Nelayan | 105 |
| 1. Analisis Pendapatan Usaha Nelayan (<i>on farm</i>) | 105 |
| 2. Pengaruh Status Keanggotaan Terhadap Pendapatan Usaha Nelayan | 114 |
| D. Analisis Manfaat Ekonomi dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Rumahtangga | 117 |
| E. Analisis Pendapatan Rumahtangga dan Pengaruh Status Keanggotaan Nelayan | 119 |

| | |
|--|------------|
| 1. Analisis Pendapatan Rumahtangga | 119 |
| 2. Pengaruh Status Keanggotaan Terhadap Pendapatan Rumahtangga | 121 |
| F. Analisis Ketahanan Pangan dan Pengaruh Status Keanggotaan Nelayan | 124 |
| 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Ketahanan Pangan Nelayan | 124 |
| 2. Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Nelayan Di Pulau Pasaran | 125 |
| a. Aspek Ketersediaan Pangan Rumahtangga Nelayan | 127 |
| b. Aspek Distribusi Pangan Rumahtangga Nelayan | 130 |
| c. Aspek Konsumsi Pangan Rumahtangga Nelayan | 133 |
| 3. Pengaruh Status Keanggotaan Terhadap Ketahanan Pangan Nelayan | 137 |
| G. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Nelayan | 138 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | 143 |
| A. Kesimpulan | 143 |
| B. Saran | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | 147 |
| LAMPIRAN | 151 |
| Tabel 33 s.d Tabel 138 | 152 - 251 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1. Persebaran koperasi di Provinsi Lampung Tahun 2014 | 4 |
| Tabel 2. Indikator stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga di Provinsi Lampung | 31 |
| Tabel 3. Indikator aksesibilitas/keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga | 32 |
| Tabel 4. Indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga | 32 |
| Tabel 5. Indeks ketahanan pangan rumah tangga | 33 |
| Tabel 6. Ringkasan beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh status keanggotaan koperasi terhadap pendapatan rumah tangga dan ketahanan pangan | 38 |
| Tabel 7. Variabel, parameter, indikator, dan pengukuran tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota koperasi | 65 |
| Tabel 8. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur, tahun 2012 | 77 |
| Tabel 9. Susunan pengurus koperasi, tahun 2011 | 81 |
| Tabel 10. Sebaran nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kota Bandar Lampung menurut golongan umur, tahun 2015 | 90 |
| Tabel 11. Sebaran nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kota Bandar Lampung menurut tingkat pendidikan normal, tahun 2015 | 91 |
| Tabel 12. Sebaran nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kota Bandar Lampung menurut jumlah tanggungan keluarga, tahun 2015 | 93 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 13. Sebaran nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kota Bandar Lampung menurut Jarak tempuh dari rumah ke laut, tahun 2015 | 94 |
| Tabel 14. Sebaran nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kota Bandar Lampung menurut usaha lain - lain, tahun 2015 | 94 |
| Tabel 15. Total biaya variabel nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada musim barat | 100 |
| Tabel 16. Total biaya variabel nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada musim normal | 100 |
| Tabel 17. Total biaya variabel nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada musim timur | 101 |
| Tabel 18. Total biaya penyusutan nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari | 104 |
| Tabel 19. Analisis pendapatan usaha nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada musim barat | 109 |
| Tabel 20. Analisis pendapatan usaha nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada musim normal | 110 |
| Tabel 21. Analisis pendapatan usaha nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada musim timur | 113 |
| Tabel 22. Hasil analisis regresi pengaruh status keanggotaan terhadap pendapatan usaha nelayan | 114 |
| Tabel 23. Total rata – rata mabfaat ekonomi diperhitungkan nelayan anggota koperasi | 118 |
| Tabel 24. Rata – rata pendapatan rumah tangga nelayan anggota dan non anggota koperasi, tahun 2015 | 120 |
| Tabel 25. Hasil analisis regresi pengaruh status keanggotaan terhadap Tingkat pendapatan rumahtangga nelayan, tahun 2015 | 122 |
| Tabel 26. Hasil uji validitas item pertanyaan untuk variabel ketahanan pangan | 124 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 27. Tingkat ketahanan pangan rumahtangga nelayan secara subyektif | 127 |
| Tabel 28. Interval aspek ketersediaan pangan dalam tingkat ketahanan pangan rumahtangga nelayan di Pulau Pasaran | 128 |
| Tabel 29. Interval aspek distribusi pangan dalam tingkat ketahanan pangan rumahtangga nelayan di Pulau Pasaran | 130 |
| Tabel 30. Interval aspek konsumsi pangan dalam tingkat ketahanan pangan rumahtangga nelayan di Pulau Pasaran | 133 |
| Tabel 31. Hasil analisis regresi pengaruh status keanggotaan terhadap tingkat ketahanan pangan nelayan, tahun 2015 | 137 |
| Tabel 32. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan | 140 |
| Tabel 33 – 34. Identitas responden nelayan anggota Koperasi ISM Mitra Karya Bahari | 152 |
| Tabel 35 – 36. Identitas responden nelayan non anggota Koperasi ISM Mitra Karya Bahari | 154 |
| Tabel 37 – 42. Biaya variabel yang diperlukan pada usaha ikan tangkap nelayan anggota koperasi pada musim barat | 156 |
| Tabel 43 – 48. Biaya variabel yang diperlukan pada usaha ikan tangkap nelayan non anggota koperasi pada musim barat | 162 |
| Tabel 49 – 54. Biaya variabel yang diperlukan pada usaha ikan tangkap nelayan anggota koperasi pada musim normal | 168 |
| Tabel 55 – 60. Biaya variabel yang diperlukan pada usaha ikan tangkap nelayan non anggota koperasi pada musim normal | 174 |
| Tabel 61 – 66. Biaya variabel yang diperlukan pada usaha ikan tangkap nelayan anggota koperasi pada musim timur | 180 |
| Tabel 67 – 72. Biaya variabel yang diperlukan pada usaha ikan tangkap nelayan non anggota koperasi pada musim timur | 186 |
| Tabel 73 – 74. Rekapitulasi surat menyurat yang diperlukan pada perahu nelayan anggota koperasi | 192 |
| Tabel 75 – 76. Rekapitulasi surat menyurat yang diperlukan pada perahu nelayan non anggota koperasi | 194 |

| | |
|---|-----|
| Tabel 77 – 78. Total produksi usaha ikan tangkap nelayan anggota koperasi | 196 |
| Tabel 79 – 80. Total produksi usaha ikan tangkap nelayan non anggota koperasi | 198 |
| Tabel 81 – 86. Penyusutan harta tetap nelayan anggota koperasi | 200 |
| Tabel 87 – 92. Penyusutan harta tetap nelayan non anggota koperasi ... | 206 |
| Tabel 93 – 96. Pendapatan usaha nelayan anggota koperasi | 212 |
| Tabel 97 – 100. Pendapatan usaha nelayan non anggota koperasi | 216 |
| Tabel 101 – 110. Manfaat ekonomi koperasi yang didapatkan anggota koperasi | 220 |
| Tabel 111 – 112. Total pendapatan lain-lain nelayan anggota koperasi | 230 |
| Tabel 113 – 114. Total pendapatan lain-lain nelayan non anggota koperasi | 232 |
| Tabel 115 – 116. Total pendapatan rumah tangga nelayan anggota koperasi | 234 |
| Tabel 117 – 118. Total pendapatan rumah tangga nelayan non anggota koperasi | 236 |
| Tabel 119 – 120. Data ordinal ketahanan pangan nelayan responden uji validitas dan reliabilitas | 238 |
| Tabel 121 – 123. Data ordinal ketahanan pangan nelayan di Pulau Pasaran | 240 |
| Tabel 124 – 125. Data interval ketahanan pangan nelayan anggota koperasi di Pulau Pasaran | 243 |
| Tabel 126 – 127. Data interval ketahanan pangan nelayan non anggota koperasi di Pulau Pasaran | 245 |
| Tabel 128. Tabel model summary pengaruh status keanggotaan dengan pendapatan usaha nelayan | 247 |
| Tabel 129. Tabel Coefficients pengaruh status keanggotaan dengan pendapatan usaha nelayan | 247 |

| | |
|--|-----|
| Tabel 130. Tabel model summary pengaruh status keanggotaan dengan pendapatan rumahtangga nelayan | 248 |
| Tabel 131. Tabel Coficients pengaruh status keanggotaan dengan pendapatan rumahtangga nelayan | 248 |
| Tabel 132. Tabel model summary pengaruh status keanggotaan dengan Ketahanan pangan nelayan | 249 |
| Tabel 133. Tabel Coficients pengaruh status keanggotaan dengan Ketahanan pangan nelayan | 249 |
| Tabel 134. Hasil anaisis regresi logistik faktor faktor yang Mempengaruhi ketahanan pangan | 250 |
| Tabel 135. Tabel Hosmer dan Lemeshow test | 250 |
| Tabel 136. Tabel variabels in the equation | 250 |
| Tabel 137. Tabel reliability statistic | 251 |
| Tabel 138. Tabel item – total statistic | 251 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 1. Struktur internal koperasi Indonesia | 12 |
| Gambar 2. Keterkaitan antar subsistem atau pilar ketahanan pangan | 27 |
| Gambar 3. Kerangka Pemikiran | 44 |
| Gambar 4. Dokumentasi wawancara bersama nelayan Pulau Pasaran | 54 |
| Gambar 5. Dokumentasi pengamatan langsung pengambilan data penelitian | 54 |
| Gambar 6. Struktur Organisasi Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari | 80 |
| Gambar 7. Struktur organisasi Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, periode tahun 2015 – 2019 | 83 |
| Gambar 8. WASERDA Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari | 85 |
| Gambar 9. Pengaruh status keanggotaan terhadap pendapatan usaha nelayan | 116 |
| Gambar 10. Pengaruh status keanggotaan terhadap pendapatan rumah tangga nelayan | 123 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan laut yang banyak dan beraneka ragam. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km², panjang garis pantai 81.000 km, dan gugusan pulau sebanyak 17.508 buah berpotensi untuk menghasilkan hasil laut yang jumlahnya besar, yaitu 6,26 juta ton. Potensi produksi perikanan Indonesia tersebut tergolong besar di sektor kelautan dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Bila sektor perikanan dikelola secara serius maka akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat nelayan dan petani ikan (Mulyadi, 2005).

Pembangunan Indonesia tidak lepas dari pembangunan masyarakat yang menjadi dasar bagi keberhasilan pembangunan Indonesia. Pembangunan masyarakat Indonesia mencakup pembangunan di seluruh aspek masyarakat seperti ekonomi, budaya, yang bergerak dalam lingkup sektor industri, pertanian, peternakan, pertambangan, perikanan, dan lainnya. Pada dasarnya

banyak permasalahan yang dihadapi untuk melakukan pembangunan, salah satunya yaitu permasalahan yang muncul pada sektor perikanan. Sektor perikanan mengalami beberapa permasalahan seperti kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir dan perairan, penurunan kualitas perairan, gejala tangkap lebih (*overfishing*), rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, tidak stabilnya harga faktor produksi, persaingan pasar yang semakin ketat, masalah kemiskinan dan permodalan. Selain itu, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan dalam teknologi juga menambah permasalahan pembangunan perikanan (Mantra, 2004).

Hal di atas berlaku juga pada nelayan yang dihadapkan pada berbagai masalah dan kendala dalam melakukan aktivitas perikanan yang merupakan kegiatan utama mereka. Salah satu wadah masyarakat yang menampung dan menyalurkan berbagai kegiatan yang dapat menunjang kehidupan pelaku perikanan adalah koperasi yang berdiri di lingkungan nelayan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam tata perekonomian Indonesia yaitu usaha negara, usaha swasta, dan koperasi. Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang bersifat kerakyatan, sehingga koperasi dipandang cocok untuk perekonomian Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, melainkan koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan anggota.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung melakukan penilaian koperasi berprestasi setiap tahunnya. Salah satu kriteria yang dinilai adalah bagaimana koperasi dapat memberikan manfaat terhadap anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi bisa menjadi penguat kelembagaan bagi terciptanya kemandirian suatu wilayah. Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung mempunyai potensi besar di bidang perkoperasian.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kota Bandar Lampung menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dengan jumlah koperasi terbanyak yaitu sebanyak 717 unit. Jumlah koperasi aktif di Kota Bandar Lampung menempati urutan ke dua setelah Kabupaten Way Kanan yaitu sebanyak 515 unit, sedangkan untuk jumlah koperasi tidak aktifnya di Bandar Lampung menempati urutan ke tiga setelah Lampung tengah dan Lampung Selatan yaitu sebanyak 202 unit. Persebaran koperasi di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Persebaran koperasi di Provinsi Lampung tahun 2014

| No | Kota/Kabupaten | Koperasi | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Jumlah (unit) | Aktif (unit) | Tidak Aktif (unit) |
| 1 | Bandar Lampung | 717 | 515 | 202 |
| 2 | Way Kanan | 689 | 541 | 148 |
| 3 | Lampung Tengah | 588 | 343 | 245 |
| 4 | Lampung Timur | 507 | 306 | 201 |
| 5 | Lampung Selatan | 406 | 165 | 241 |
| 6 | Lampung Utara | 317 | 133 | 184 |
| 7 | Tanggamus | 261 | 175 | 86 |
| 8 | Metro | 188 | 124 | 64 |
| 9 | Pesawaran | 174 | 109 | 65 |
| 10 | Pringsewu | 159 | 72 | 87 |
| 11 | Tulang Bawang | 156 | 106 | 50 |
| 12 | Lampung Barat | 139 | 50 | 89 |
| 13 | Mesuji | 108 | 84 | 24 |
| 14 | Tulang Bawang Barat | 106 | 74 | 32 |
| 15 | Pesisir Barat | 70 | 35 | 35 |
| 16 | Provinsi | 113 | 56 | 57 |
| Jumlah | | 4.698 | 2.888 | 1.810 |

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, 2014.

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim yang mempunyai kekayaan sumber daya alam potensial, sudah sewajarnya mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan. Masyarakat juga berperan dalam penyelenggaraan produksi dan penyediaan, perdagangan dan distribusi, sebagaimana tercantum dalam GBHN 1999-2004 yaitu “Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, baik jumlah maupun yang dibutuhkan pada tingkat harga terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi” yang diatur

dengan undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas Tahun 2000-2004 yaitu penetapan program peningkatan ketahanan pangan (Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2002).

Salah satu isu sentral dalam pembangunan pertanian dalam kerangka pembangunan nasional periode 2010-2014 adalah pemantapan ketahanan pangan. Pemantapan ketahanan pangan terkait erat dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karenanya merupakan hak asasi manusia untuk tidak mengalami kekurangan pangan. Terdapat faktor-faktor utama yang menentukan ketersediaan pangan dan ketahanan pangan diantaranya yaitu lahan dan pengasaan lahan, infrastruktur, teknologi, keahlian dan wawasan, energi, dana (aspek perkreditan), lingkungan fisik/iklim, relasi kerja, dan sistem ketersediaan bahan baku dan input lainnya.

Tercapainya ketahanan pangan yang baik di tingkat perorangan dan rumah tangga secara simultan berhubungan erat dengan tercapainya ketahanan pangan ditingkat wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga, baik rumah tangga petani maupun non petani. Khususnya bagi rumah petani, kelebihan produksi pangan selain untuk menghasilkan pendapatan, juga diharapkan dapat disimpan sebagai cadangan pangan. Untuk pangan-pangan lain yang tidak dapat diproduksi sendiri maka akan tergantung kepada pemasok pangan di wilayah masing-masing (Indriani, 2015).

Tingkat ketahanan pangan yang tidak hanya cukup sampai tingkat global, nasional, maupun regional tetapi harus sampai tingkat rumah tangga atau individu dan dipengaruhi oleh pendapatan individu itu sendiri. Data ketahanan pangan di tingkat nasional dan regional (provinsi) yang tergolong aman dan terjamin, tetapi tidak menjamin di dalam wilayah masih ditemukan proporsi rumah tangga rawan pangan yang cukup tinggi. Oleh karena itu penting untuk melakukan identifikasi rumah tangga rawan pangan di wilayah yang tergolong tahan pangan. Hasil identifikasi diharapkan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan pangan dan gizi untuk menetapkan prioritas wilayah dalam rangka peningkatan ketahanan pangan rumah tangga.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dibangun di setiap wilayah diupayakan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu UMKM yang ada di wilayah penelitian ialah Warung Serba Ada (Waserda) yang merupakan unit usaha sebuah koperasi yang berdiri disana. Perkembangan koperasi secara nasional di masa datang diperkirakan menunjukkan peningkatan yang signifikan namun masih lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai dengan jatidiri koperasi. Hanya koperasi yang berkembang melalui praktik melaksanakan nilai koperasi yang akan mampu bertahan dan mampu memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi bagi anggotanya. Prospek koperasi pada masa datang dapat dilihat dari banyaknya jumlah koperasi, jumlah anggota, jumlah modal, volume usaha, dan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang telah dihimpun koperasi.

Kedudukan koperasi sebagai salah satu sektor ekonomi nasional yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, dengan demikian keberadaan koperasi akan diarahkan membantu meningkatkan pendapatan para nelayan sehingga kehidupan ekonomi yang diperoleh lebih baik, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota, dan meningkatkan ketahanan pangan para anggota koperasi. Pada umumnya, sulit para nelayan untuk mendapatkan alat-alat melaut berpengaruh terhadap hasil tangkap ikan yang mereka peroleh. Jumlah hasil tangkap ikan yang sedikit menyebabkan makin turunnya tingkat kesejahteraan para nelayan sehingga ketahanan pangannya juga akan rendah.

Koperasi Perikanan Ikhtiar Swadaya Masyarakat (ISM) Mitra Karya Bahari merupakan hasil kerjasama antara para nelayan dengan dibantu oleh Bank Indonesia, sehingga sebagian besar nelayan di Pulau Pasaran berpartisipasi menjadi anggota koperasi. Keberadaan koperasi ini merupakan salah satu cara mengatasi kesulitan para nelayan untuk mendapatkan sarana produksi perikanan dengan mudah dan harga yang lebih murah, serta dapat menentukan sendiri harga jual hasil tangkap ikannya dengan harga yang pantas dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan nelayan untuk menjalankan usahanya. Pada intinya, para nelayan dapat memperoleh pendapatan yang maksimal dari manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi, yaitu meningkatnya daya beli nelayan dengan diikuti meningkatnya pula ketersediaan pangan untuk kehidupan para nelayan. Dengan demikian akan terlihat tingkat ketahanan pangan para nelayan yang menjadi anggota koperasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dijawab melalui penelitian, yaitu:

1. Berapa pendapatan usaha nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari?
2. Berapa besar kontribusi manfaat ekonomi koperasi yang diperoleh nelayan anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari?
3. Berapa pendapatan rumahtangga nelayan anggota dan non anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari?
4. Bagaimana tingkat ketahanan pangan nelayan yang tergabung sebagai anggota koperasi dan non anggota koperasi serta pengaruh status keanggotaan terhadap ketahanan pangan?
5. Apa sajakah faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan nelayan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui besarnya pendapatan usaha nelayan anggota dan non anggota koperasi serta pengaruh status keanggotaan terhadap tingkat pendapatan usaha nelayan.
2. Mengetahui besar kontribusi manfaat ekonomi yang diterima oleh nelayan sebagai anggota koperasi terhadap pendapatan rumahtangga.
3. Mengetahui besarnya pendapatan rumahtangga nelayan anggota dan non anggota serta pengaruh status keanggotaan terhadap tingkat pendapatan rumahtangga nelayan.

4. Mengetahui tingkat ketahanan pangan nelayan yang tergabung sebagai anggota koperasi dan non anggota koperasi serta pengaruh status keanggotaan terhadap ketahanan pangan nelayan.
5. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan nelayan.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak koperasi, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana strategi operasional pada periode yang akan datang.
2. Bagi Badan Ketahanan Pangan dan nelayan Pulau Pasaran, diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat ketahanan pangan nelayan sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan pangan rumah tangga.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap penetapan kebijakan, terutama kaitannya dengan pengembangan koperasi dan peningkatan ketahanan pangan di Indonesia.
4. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau melanjutkan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

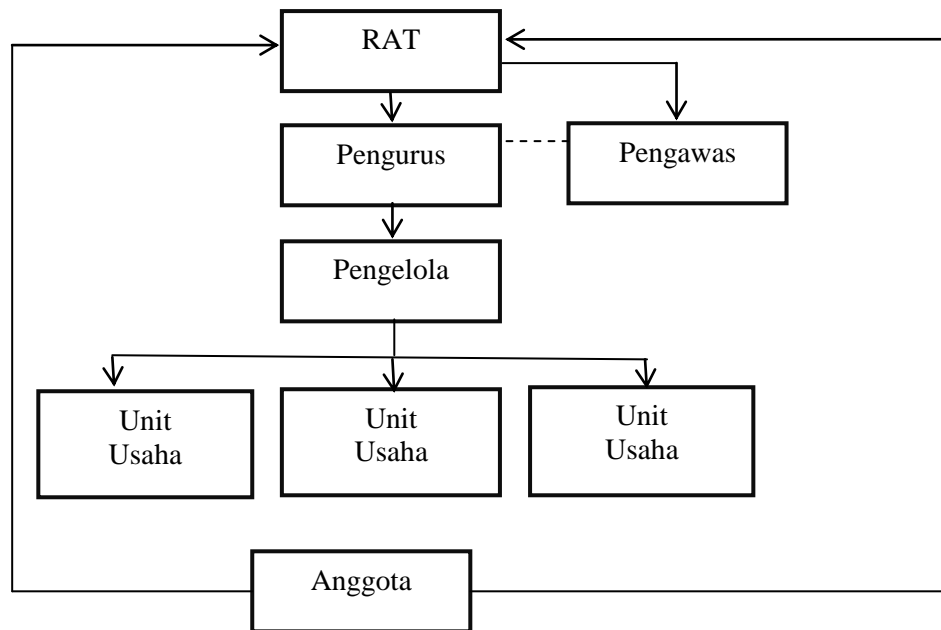
1. Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi juga berasaskan kekeluargaan yang memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi memiliki prinsip yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Menurut Sitio dan Tamba (2001), koperasi membutuhkan struktur untuk menjalankan organisasi dan usaha. Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa struktur dan tatanan manajemen koperasi Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas: (1) mengelola organisasi koperasi dan usahanya, (2) mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi, (3) menyelenggarakan rapat anggota, dan (4) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Perangkat koperasi yang ke tiga adalah pengawas. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Perangkat koperasi yang terakhir adalah pengelola. Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Seluruh unit usaha koperasi dikelola oleh mereka yang diberikan tanggungjawab sebagai pengelola.



Gambar 1. Struktur internal koperasi

Kinerja dari suatu koperasi ditentukan oleh tingkat partisipasi dari anggotanya. Anggota merupakan salah satu pihak yang menentukan keberhasilan dari suatu koperasi. Kedudukan anggota dalam koperasi sangatlah penting karena anggota sebagai pemilik (*owner*) dan juga sebagai pelanggan (*user*) bagi koperasi. Koperasi hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila mendapat dukungan dari anggotanya, baik dukungan melakukan transaksi, kehadiran dalam rapat anggota, maupun dalam penyertaan modal. Koperasi membutuhkan modal untuk menjalankan organisasi dan usaha koperasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah dari anggota maupun dari masyarakat. Sedangkan,

modal pinjaman dapat berasal dari: (1) anggota koperasi, (2) koperasi lainnya dan/atau anggotanya, (3) bank dan lembaga keuangan lainnya, (4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta (5) sumber lain yang sah. Menurut Subandi (2010), penyertaan modal dalam koperasi pada dasarnya merupakan suatu investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukti keikutsertaannya dalam bentuk saham.

a. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Koperasi memiliki fungsi dan peran dalam pendiriannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 4, Fungsi dan peran koperasi meliputi:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 5, Koperasi melaksanakan prinsip koperasi

meliputi: (1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (4) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (5) kemandirian, (6) pendidikan perkoprasian dan (7) kerjasama antar koperasi.

b. Sifat Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Setiap warga Negara Indonesia pada dasarnya memiliki hak menjadi anggota koperasi. Tetapi karena koperasi adalah sebuah badan hukum yang akan melakukan tindakan-tindakan hukum, yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanyalah mereka yang mampu melakukan tindakan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi itu sendiri. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, keanggotaan koperasi pada dasarnya bersifat terbuka dan sukarela. Sifat sukarela yang dimaksud adalah bahwa setiap orang yang mendaftar menjadi anggota koperasi benar-benar atas kemauannya sendiri dan sifat terbuka yang dimaksud adalah keanggotaan koperasi tidak mengenal diskriminasi dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 25 tahun 1992 salah satu syarat pendirian koperasi di Indonesia adalah tercatatnya 20 orang anggota. Artinya jumlah minimal anggota, pada saat pendirian koperasi adalah 20 orang. Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat yang dapat

menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dipenuhi, tidak dapat dipindahtangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam anggaran dasar (Hendar, 2010).

Seorang anggota koperasi yang baik adalah yang mengutamakan pemenuhan semua kewajibannya sebelum menuntut hak-haknya sebagai anggota koperasi. Dengan demikian seorang anggota koperasi yang baik harus berusaha memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak-haknya. Ditegaskan dalam pasal 20 UU No 25 1992 kewajiban-kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan.

Seperti halnya dengan kewajiban anggota, hak anggota koperasi ada yang sudah ditetapkan dalam UU Koperasi ada pula yang diatur dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hak-hak anggota koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.
- 2) Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
- 3) Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta atau tidak diminta.
- 5) Memanfaatkan koperasi dengan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Hak-hak anggota tersebut tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh para pengurus koperasi, karena hak-hak tersebut melekat pada keanggotaan setiap anggota koperasi. Adanya pengakuan atas hak-hak anggota koperasi itu adalah cerminan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang demokratis.

Dalam beberapa hal, koperasi dapat saja menetapkan syarat – syarat khusus bagi calon anggota yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Pengertian syarat - syarat khusus adalah tambahan dari syarat - syarat umum yang juga harus dipenuhi oleh calon - calon anggota untuk dapat diterima menjadi anggota penuh.

Syarat-syarat khusus ini dapat berbeda-beda dari satu koperasi dengan koperasi lainnya. Berikut adalah contoh syarat khusus keanggotaan pada jenis koperasi perikanan. Anggotanya terdiri dari pemilik perahu dan pemilik kapal, pemilik alat - alat penangkap ikan, dan para nelayan penangkap ikan yang tidak memiliki perahu atau peralatan khusus.

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian depan bahwa keanggotaan koperasi adalah sukarela dan terbuka sifatnya. Keinginan untuk masuk menjadi anggota dan keluar sebagai anggota adalah sifatnya sukarela. Namun demikian ada pula ketentuan lain yang menjadikannya menjadi anggota koperasi. Ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Meninggal dunia

Bila seorang anggota meninggal dunia, maka status keanggotaannya secara otomatis gugur saat dia meninggal. Sesuai ketentuan, maka keanggotaan ini tidak bisa dipindahtangankan kepada siapapun.

2) Minta berhenti karena atas kehendak sendiri

Ini merupakan hal biasa apabila permohonan itu diajukan secara tertulis kepada pengurus, atas permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pengurus dan sekaligus dibicarakan tentang hak-haknya (khususnya dalam bentuk simpanan) dan kewajiban yang masih melekat pada yang bersangkutan.

3) Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan

Hal ini bisa terjadi apabila seorang anggota koperasi pindah ketempat lain diluar jangkauan daerah kerja koperasi atau bisa juga karena yang bersangkutan pindah pekerjaan, misalnya dari pegawai

negeri pindah ke swasta (syarat anggota pegawai negeri dalam KPN tidak dipenuhi).

4) Dipecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

Apabila seorang anggota secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota, misalnya tidak mau bayar simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, dan sebagainya dan tindakan tersebut dianggap merugikan perkembangan koperasi maka pengurus dapat mengambil tindakan untuk menghapus keanggotaannya dalam koperasi, tentunya setelah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada yang bersangkutan.

Setiap orang yang menjadi anggota koperasi pasti didasari oleh kebutuhan - kebutuhan tertentu yang dapat diraih dari koperasi tersebut.

Orang yang merasa lemah kondisi ekonominya, motif ekonomi lebih dominan untuk dijadikan alasan menjadi anggota koperasi. Mengingat pendapatan merupakan yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan, maka alasan ekonomi untuk memasuki atau menetap pada suatu koperasi menjadi pilihan utama dalam pembahasan ekonomi koperasi.

Ekonomi disini diartikan sebagai evolusi rasional dari keunggulan yang dapat direalisasikan oleh seorang anggota dengan menggunakan atau dengan tidak menggunakan pelayanan-pelayanan koperasi tertentu.

Seperti yang diketahui, tujuan utama didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pernyataan inilah maka dapat disimpulkan bahwa koperasi sangat menguntungkan bagi

anggotanya baik secara keuangan (financial) maupun non financial.

Manfaat secara keuangan yang dirasakan oleh para anggotanya adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan adanya koperasi, anggota dapat meminjam uang pada koperasi untuk modal usaha dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman kepada rentenir.
- 2) Setiap anggota dapat membeli barang - barang kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah di koperasi.
- 3) Pada akhir tahun setiap anggota mendapat keuntungan yang disebut SHU yang tentu saja setelah dikurangi biaya-biaya operasional. Dimana pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha ini dibagi secara adil sehingga tidak ada yang dirugikan.

c. Manfaat Ekonomi Koperasi

Menurut Munker (1990), Manfaat ekonomi koperasi dibagi menjadi manfaat ekonomi koperasi tunai dan manfaat ekonomi koperasi diperhitungkan. Manfaat ekonomi tunai berupa sisa hasil usaha, sedangkan manfaat ekonomi koperasi diperhitungkan berupa harga pelayanan.

Sisa Hasil Usaha koperasi menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota. Sisa Hasil Usaha sendiri dibagikan kepada para anggota koperasi berdasarkan kesepakatan anggota yang biasanya terakumulasi dari penghitungan jasa kepada koperasi. Adapun SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi biaya, penyusutan

dan kewajiban lain (termasuk pajak) dan besarnya SHU yang dibagikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang dilakukan oleh anggota tersebut.

Manfaat ekonomi diperhitungkan yaitu berupa harga pelayanan koperasi kepada anggotanya yang mana diberikan koperasi dalam memajukan usaha anggotanya. Sesuai dengan tujuan koperasi maka prioritas yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan koperasi yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan perbaikan kapasitas koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, koperasi harus mewujudkannya melalui penyediaan barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan anggota dengan penawaran harga, kualitas dan kondisi yang lebih menguntungkan anggota dari pada penawaran yang ditawarkan oleh pasar untuk memberikan pelayanan yang baik kepada anggota.

Menurut Nasution (1990), karakteristik yang harus dimiliki oleh koperasi agar dapat disebut sebagai pusat pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu menyediakan sarana dan bahan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kodrat sebagai manusia baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk kegiatan produksi.
- 2) Mampu berperan untuk membangkitkan inisiatif lokal agar semua masyarakat dapat meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut

- 3) Dapat berperan sebagai sarana dalam proses transformasi struktural termasuk redistribusi faktor-faktor produksi dan pendapatan.

2. Pendapatan Usaha Nelayan

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan usahatani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya produksi (input) yang dihitung dalam per bulan, per tahun, per musim tanam. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, mengojek, kuli, dan sebagainya.

Pendapatan usahatani dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil. Sedangkan pendapatan bersih adalah seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi.

Menurut Ahmadi (2001), dalam pendapatan usahatani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usahatani

tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut. Produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi tersebut (Mubyarto, 1989).

Menurut Soekartawi (1995), biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam usahatani. Biaya usahatani dibedakan menjadi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan dihasilkan, sedangkan biaya tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume produksi. Secara matematis untuk menghitung pendapatan usahatani dapat ditulis sebagai berikut :

$$\pi = Y \cdot P_y - \sum X_i \cdot P_{x_i} - BTT \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

| | |
|-----------|---|
| π | = Pendapatan (Rp) |
| Y | = Hasil produksi (Kg) |
| P_y | = Harga hasil produksi (Rp) |
| X_i | = Faktor produksi ($i = 1, 2, 3, \dots, n$) |
| P_{x_i} | = Harga faktor produksi ke-i (Rp) |
| BTT | = Biaya tetap total (Rp) |

3. Pendapatan Rumahtangga

Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar

usahatani. Pendapatan rumah tangga diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan keluarga dari usahatani ikan tangkap dan pendapatan keluarga yang berasal dari luar usahatani ikan tangkap, dengan rumus sebagai berikut:

$$P_{rt} = P_{\text{usahatani ikan tangkap}} + P_{\text{lain-lain}} + P_{\text{manfaat ekonomi}} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| P_{rt} | = | Pendapatan Rumah Tangga |
| $P_{\text{usahatani ikan tangkap}}$ | = | Pendapatan dari usahatani ikan tangkap |
| $P_{\text{lain-lain}}$ | = | Pendapatan dari luar usitan dan koperasi |
| $P_{\text{manfaat ekonomi}}$ | = | Manfaat Ekonomi |

Dari rumus diatas maka semakin besar manfaat ekonomi koperasi yang diterima anggota, maka semakin besar pula pendapatan rumah tangga yang akan diterima. Sumber pendapatan keluarga atau rumah tangga digolongkan ke dalam dua sektor, yaitu sektor pertanian (*on farm*) dan non pertanian (*non farm*). Sumber pendapatan dari sektor pertanian dapat dirincikan lagi menjadi pendapatan usaha ikan tangkap nelayan dan pendapatan usahatani lainnya. Sumber pendapatan dari sektor non pertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri keluarga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh non pertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1997).

Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan indikator yang penting untuk mengetahui tingkat hidup rumah tangga. Pada umumnya pendapatan rumah tangga nelayan tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga nelayan diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pendapatan

nelayan dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga.

Menurut teori Maslow manusia mempunyai lima kebutuhan yang membentuk tingkatan-tingkatan atau disebut juga hirarki dari yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Lima kebutuhan dasar Maslow disusun berdasarkan kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak terlalu krusial:

a. Kebutuhan Fisiologis

Contoh: sandang / pakaian, pangan / makanan, papan / rumah, dan kebutuhan biologis seperti buang air besar, buang air kecil, bernafas, dan lain sebagainya.

b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan

Contoh: bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari rasa sakit, bebas dari teror, dan lain sebagainya.

c. Kebutuhan Sosial

Contoh: memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis, dan lain-lain.

d. Kebutuhan Penghargaan

Contoh: pujian, piagam, tanda jasa, hadiah, dan banyak lagi lainnya.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Adalah kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Menurut Soekirno (1985), ukuran pendapatan yang digunakan untuk tingkat kesejahteraan keluarga adalah pendapatan rumah tangga yang

diperoleh dari bekerja. Tiap anggota keluarga berusia kerja dirumah tangga akan terdorong bekerja untuk kesejahteraan keluarganya. Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa anggota keluarga seperti istri dan anak-anak adalah penyumbang dalam berbagai kegiatan baik dalam pekerjaan rumah tangga maupun mencari nafkah.

Tolak ukur yang penting dalam melihat kesejahteraan nelayan adalah pendapatan rumahtangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan nelayan. Besarnya pendapatan nelayan sendiri akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Tingkat pendapatan rumahtangga merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat hidup rumahtangga. Umumnya pendapatan rumahtangga di pedesaan tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Besar kecilnya pendapatan rumahtangga akan berpengaruh pada ketahanan pangan. Pendapatan rumahtangga dapat dijadikan indikator bagi ketahanan pangan rumahtangga karena pendapatan merupakan salah satu kunci utama bagi rumahtangga untuk mengakses ke pangan (Mosher, 1987).

4. Ketahanan Pangan

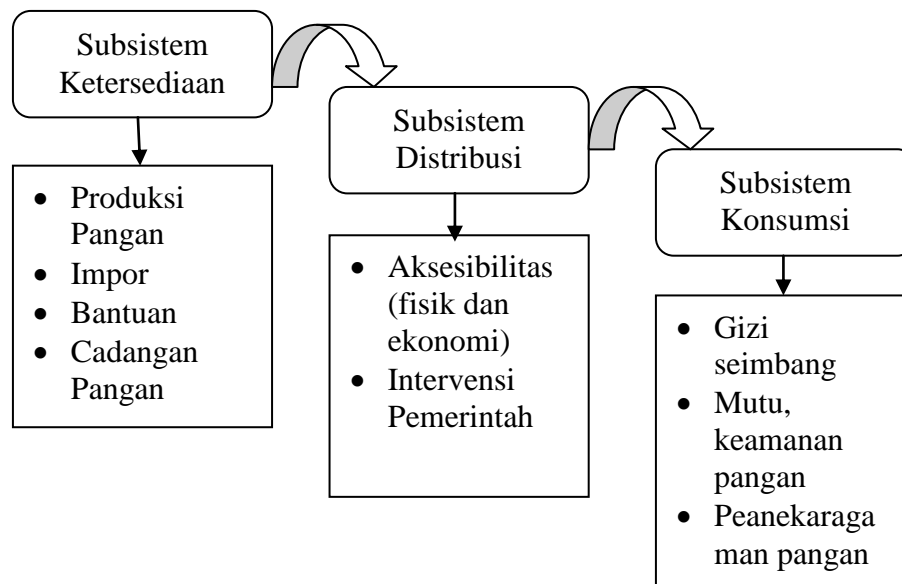
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembahasan tentang ketahanan pangan diawali oleh adanya krisis pangan dunia pada tahun 1972-1974, pada waktu itu ketersediaan pangan ditingkat nasional dan internasional mengalami kekurangan terutama pada pangan pokok padi-padian. Oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam ketahanan pangan pada masa itu ditekankan pada pendekatan penyediaan pangan. Namun demikian pendekatan ini ternyata dinilai kurang berhasil karena tidak memperhatikan aspek distribusi dan akses pangan. Asumsi awalnya adalah jika pangan tersedia cukup maka akan diperdagangkan dan disalurkan ke seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau oleh semua keluarga. Kenyataannya distribusi pangan tidak merata dan sebagian keluarga masih mengalami kelaparan karena tidak dapat membeli pangan yang bagi mereka harganya tidak terjangkau (Indriani, 2015).

Ketahanan pangan nasional atau wilayah terdapat tiga pilar atau subsistem yaitu ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Keterkaitan antartiga subsistem tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Masing-masing subsistem

dalam ketahanan pangan memiliki indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kinerja subsistemnya.



Gambar 2. Keterkaitan antar subsistem atau pilar ketahanan pangan (Suryana dalam Indriani, 2015).

Berdasarkan pengertian dan konsep di atas maka sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu "ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan". Salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik (Arifin, 2004). Persediaan pangan yang cukup secara nasional tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat regional maupun rumah tangga/individu. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan beragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat. Penentu utama di

tingkat rumah tangga adalah ketersediaan pangan, akses (fisik dan ekonomi) terhadap pangan dan dampak yang terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut (Suryana dalam Indriani, 2015).

Konsumsi pangan dilakukan untuk memenuhi kecukupan energi dan protein. Kecukupan energi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, status fisiologis, kegiatan, iklim dan adaptasi. Kecukupan protein dipengaruhi oleh faktor-faktor umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, status fisiologis, kualitas protein, tingkat konsumsi energi dan adaptasi (Hardinsyah, Riyadi dan Napitupulu, 2012).

Situasi konsumsi di beberapa provinsi di Indonesia belum mencapai keberagaman dan keseimbangan, hal tersebut dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih jauh di bawah ideal. Umumnya hampir seluruh provinsi belum memiliki pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Hanya sembilan provinsi yang mampu mencapai skor mutu pangan yaitu Lampung, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

Rata-rata pola pangan dengan anjuran PPH sebesar 2000 kkal/kap/hari, tahun 2012 sampai tahun 2013 masih berada dibawah anjuran PPH yang ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan tetapi di tahun 2013 turun yaitu 1.865,3 kkal/kap/hari menjadi 1.842,7 kkal/kap/hari. Rata-rata pola pangan tahun 2012 dan 2013 konsumsi pangan penduduknya masih didominasi oleh sumber karbohidrat terutama komoditi padi-padian yaitu proporsi beras

menempati porsi besar dalam menu makanan sebagian besar penduduk provinsi secara nasional (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, 2013).

Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat tergantung dari cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga untuk mencapai gizi baik dan hidup sehat. Untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga digunakan ukuran ketahanan pangan dengan empat komponen yaitu menurut Tim Peneliti Puslit Kependudukan (PPK LIPI, 2004):

- a. Kecukupan ketersediaan pangan
- b. Stabilitas ketersediaan pangan
- c. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan
- d. Kualitas dan keamanan pangan.

Gabungan keempat komponen indikator ketahanan pangan tersebut merupakan indeks ketahanan pangan. Penjelasan masing-masing komponen ketahanan pangan tersebut sebagai berikut:

- a. Kecukupan ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan dalam rumah tangga mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Untuk kawasan pertanian, penentuan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya 240 hari, karena panen padi rata-rata selama 3 kali dalam 2 tahun atau 240 hari. Berdasarkan ketersediaan pangan pokoknya rumah tangga pertanian dapat dikategorikan sebagai berikut.

- 1) Jika persediaan pangan rumah tangga \geq 240 hari, berarti persediaan pangan cukup
- 2) Jika persediaan pangan rumahtangga antara 1-239 hari, berarti persediaan pangan rumahtangga kurang cukup
- 3) Jika rumahtangga tidak punya persediaan pangan, berarti persediaan pangan rumahtangga tidak cukup.

Untuk rumahtangga yang berpenghasilan dari sektor nonpertanian, maka perlu koreksi ukuran lain.

b. Stabilitas Ketersediaan

Stabilitas ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Rumah tangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan di atas cutting point (240 hari untuk Provinsi Lampung) dan anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di Lampung. Kombinasi antara ketersediaan makanan pokok dengan frekuensi makan (3 kali per hari disebut cukup makan, 2 kali disebut kurang makan, 1 kali disebut sangat kurang makan) sebagai indikator kecukupan pangan, menghasikan indikator stabilitas ketersediaan pangan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Stabilitas Ketersediaan Pangan di tingkat rumah tangga di Provinsi Lampung

| Kecukupan ketersediaan pangan | Frekuensi makanan anggota rumah tangga | | |
|-------------------------------|--|---------------|--------------|
| | > 3 kali | 2 kali | 1 kali |
| > 240 hari | Stabil | Kurang stabil | Tidak stabil |
| 1 – 239 hari | Kurang stabil | Tidak stabil | Tidak stabil |
| Tidak ada persediaan | Tidak stabil | Tidak stabil | Tidak stabil |

Sumber: Tim Peneliti Puslit Kependudukan (PPK) LIPI, (2004).

c. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan

Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan (misalnya sawah untuk Provinsi Lampung) serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 kategori: (1) akses langsung (direct access), jika rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang; (2) akses tidak langsung (indirect access) jika rumah tangga tidak memiliki lahan/ladang. Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam 2 kategori yaitu: (1) produksi sendiri dan (2) membeli. Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan rumah tangga terhadap pangan dikelompokkan dalam kategori dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator aksesibilitas/keterjangkauan pangan di tingkat rumah tangga

| Pemilikan sawah/ladang | Cara rumah tangga memperoleh bahan pangan | |
|------------------------|---|----------------------|
| Punya | Akses langsung | Akses tidak langsung |
| Tidak punya | Akses tidak langsung | |

Sumber: Tim Peneliti Puslit Kependudukan (PPK) LIPI, (2004).

Dari pengukuran indikator aksesibilitas ini kemudian diukur indikator kontinuitas ketersediaan pangan yang merupakan penggabungan dari stabilitas ketersediaan pangan dan aksesibilitas terhadap pangan. Indikator stabilitas ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga apakah: (a) mempunyai persediaan pangan cukup, (b) konsumsi rumah tangga normal dan, (3) mempunyai akses langsung terhadap pangan. Indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Indikator kontinuitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga

| Akses terhadap pangan | Stabilitas ketersediaan pangan rumah tangga | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|
| | Stabil | Kurang stabil | Tidak stabil |
| Akses langsung | Kontinyu | Kurang kontinyu | Tidak kontinyu |
| Akses tidak langsung | Kurang kontinyu | Tidak kontinyu | Tidak kontinyu |

Sumber: Tim Peneliti Puslit Kependudukan (PPK) LIPI, (2004).

d. Kualitas/Keamanan pangan

Kualitas/keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang terdiri dari kecukupan energi dan protein.. Karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari pengeluaran untuk konsumsi

makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan atau nabati. Berdasarkan kriteria ini rumah tangga dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu: (1) rumah tangga dengan kualitas pangan baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja, (2) rumah tangga dengan kualitas pangan kurang baik adalah rumah tangga yang memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein nabati saja, (3) rumah tangga dengan kualitas pangan tidak baik adalah rumah tangga yang tidak memiliki pengeluaran untuk lauk-pauk berupa protein baik hewani maupun nabati.

Tabel 5. Indeks ketahanan pangan rumah tangga

| Kontinuitas ketersediaan pangan | Kualitas/keamanan pangan: konsumsi protein hewani dan/atau nabati | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|---|
| | Protein hewani dan nabati/ protein hewani saja | Protein nabati saja | Tidak ada konsumsi protein hewani, dan nabati |
| Kontinyu | Tahan | Kurang tahan | Tidak tahan |
| Kurang kontinyu | Kurang tahan | Tidak tahan | Tidak tahan |
| Tidak kontinyu | Tidak tahan | Tidak tahan | Tidak tahan |

Sumber: Tim Peneliti Puslit Kependudukan (PPK) LIPI, (2004).

Tabel 5 di atas merupakan gabungan antara indikator kontinuitas ketersediaan pangan dengan kualitas/keamanan pangan merupakan indeks ketahanan pangan rumah tangga. Berdasarkan matrik sebelumnya, maka ketahanan pangan rumah tangga dapat dibedakan menjadi tiga kategori.

- (1) Tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki persediaan pangan/makanan pokok secara kontinyu (diukur dari persediaan makan selama jangka masa tertentu dengan frekuensi 3 kali atau lebih per hari serta akses langsung) dan memiliki pengeluaran untuk protein hewani dan nabati atau protein hewani saja, konsumsi pangan beragam.
- (2) Kurang tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki kontinyuitas pangan pokok kontinyu tetapi hanya mempunyai pengeluaran untuk protein nabati saja atau kontinyuitas ketersediaan pangan kurang kontinyu dan mempunyai pengeluaran untuk protein hewani dan nabati.
- (3) Tidak tahan pangan adalah rumah tangga yang dicirikan oleh:
 - (a) Kontinyuitas ketersediaan pangan kontinyu, tetapi tidak memiliki pengeluaran untuk protein hewani maupun nabati
 - (b) Kontinyuitas ketersediaan pangan kurang kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein hewani atau nabati, atau tidak keduanya
 - (c) Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu walaupun memiliki pengeluaran untuk protein nabati dan hewani
 - (d) Kontinyuitas ketersediaan pangan tidak kontinyu dan hanya memiliki pengeluaran untuk protein nabati saja, atau tidak untuk kedua-duanya.

Ketahanan pangan menurut Dewan Ketahanan Pangan (2003) terdiri dari tiga subsistem, yaitu:

- a. Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya dan aman.
- b. Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga atau individu.
- c. Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Mengacu pada penjelasan di atas maka penelitian ketahanan pangan rumah tangga adalah akses atau kemampuan setiap rumah tangga untuk memperoleh atau terpenuhinya bahan pangan yang cukup bagi rumah tangganya agar dapat hidup sehat. Ukuran yang digunakan adalah menggunakan ukuran subyektif yaitu ukuran ketahanan pangan yang didasarkan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan rumah tangga terhadap situasi pangannya yaitu mengenai ketersediaan pangan rumah tangganya (kecukupan ketersediaan, dan stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim), distribusi pangan/aksesibilitas/ terhadap pangan, dan kualitas pangannya.

Berbeda dengan Pakpahan dan Pasandaran (1990), menggunakan ukuran ketahanan pangan yang dikelompokkan dalam ukuran subyektif dan ukuran obyektif. Ukuran subyektif adalah ukuran ketahanan pangan yang didasarkan atas opini, pandangan, sikap atau pendapat orang terhadap situasi pangannya, sedangkan jika menggunakan ukuran

obyektif maka didasarkan atas jumlah makanan secara umum, jumlah energi yang dikonsumsi, ketersediaan pangan per kapita, pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga, dan kemampuan rumah tangga menghadapi goncangan.

5. Penelitian Terdahulu

Peneliti harus mempelajari penelitian sejenis di masa lalu untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada penulis tentang penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah peneliti sama – sama menghitung besar pendapatan usaha, manfaat ekonomi yang didapatkan anggota dalam suatu koperasi, dan pendapatan rumah tangga yang diperoleh dalam suatu rumahtangga. Perhitungan dilakukan dengan analisis kuantitatif.

Peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu yang biasanya hanya berhenti untuk mengetahui besarnya pendapatan rumahtangga responden tetapi pada penelitian ini peneliti menambahkan dengan melihat pengaruh dari status keanggotaan pada koperasi yang diteliti, yaitu Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari terhadap pendapatan usaha dan pendapatan rumahtangga. Perbedaan juga muncul dalam penelitian ini dengan adanya perhitungan terhadap ketahanan pangan responden. Ketahanan pangan dihitung secara subyektif dengan

menggunakan tiga parameter yang setiap parameternya terdiri dari dua indikator yang diberi skor dengan skala likert jenjang 5 (1,2,3,4,5) dan dilihat pula pengaruh status keanggotaan terhadap ketahanan pangan, serta faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Beberapa ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Ringkasan beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh status keanggotaan koperasi terhadap pendapatan rumah tangga dan ketahanan pangan

| No | Peneliti | Judul | Metode Analisis | Hasil |
|----|-----------------|--|--|--|
| 1 | Lubis (2010) | Pengaruh Koperasi dalam ketersediaan Sarana Produksi dan Penyuluhan Terhadap Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat Sumatera Utara | Analisis Deskriptif dan Cobb-Douglass | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya lembaga perekonomian desa yakni KUD agar dapat melayani kebutuhan sosial ekonomi anggota. 2. Sarana produksi di KUD khususnya pupuk tersedia tapi belum mencukupi kebutuhan para anggotanya. |
| 2 | Hendrik (2011) | Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau | Metode Tabulasi dan Deskriptif | Berdasarkan kriteria UMR didapat bahwa seluruh nelayan mempunyai pendapatan di atas UMR, tetapi berdasarkan Bappenas sebanyak 4 rumah tangga nelayan tidak sejahtera, dan menurut BPS sebanyak 6 rumah tangga responden termasuk ke dalam rumah tangga tidak sejahtera. |
| 3 | Mahasari (2014) | Kesejahteraan Rumah Tangga Pengolah Ikan Teri Asin di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung | Metode Analisis Deskriptif Kuantitatif (Suyanto dan Sutinah 2005). | Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, bahwa pengeluaran per kapita per tahun baik untuk pengeluaran pangan, nonpangan dan pengeluaran rumah tangga (pengeluaran total) yang diukur menggunakan standar harga beras per kilogram berada di atas 480 kilogram beras per tahunnya. Hal ini berarti, seluruh rumah tangga pengolah ikan teri asin di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung berada dalam kriteria |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | | | hidup layak berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Sajogyo. |
| 4 | Laisa (2013) | Analisis Harga Pokok Produksi dan Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Teri Nasi Kering di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung | Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. | Harga pokok produksi (HPP) pada industri pengolahan ikan teri nasi berdasarkan analisis metode variabel <i>costing</i> pada musim angin Barat adalah Rp43.330,15, pada musim angin Normal adalah Rp34.269,58 dan harga pokok produksi pada musim angin Timur adalah Rp31.180,36. Perbedaan harga jual tersebut dipengaruhi ketersediaan bahan baku pada setiap musim. |
| 5 | Nilasari (2012) | Analisis Hubungan Antara Pendapatan dengan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Kecukupan Gizi Rumah Tangga Petani di Kabupaten Cilacap | Metode Analisis Deskriptif | Besarnya rata-rata proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total adalah 59,12%, yang artinya pengeluaran konsumsi pangan masih mengambil sebagian besar bagian dari pengeluaran rumah tangga petani. |
| 6 | Dinata (2014) | Peran Koperasi Simpan Pinjam Tani Makmur Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Jagung di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan.. | Analisis Pendapatan dan Analisis Deskriptif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan usahatani jagung anggota dan non anggota Koperasi Tani Makmur di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan berbeda nyata. 2. Total Manfaat ekonomi koperasi yang diterima petani anggota koperasi Tani Makmur di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan sebesar Rp. 440.00,00 yang terdiri |

| | | | | |
|---|---------------|---|--|--|
| | | | | dari manfaat ekonomi koperasi tunai dan diperhitungkan. |
| 7 | Rangga (2014) | Keefektifan Kelompok Afinitas Usaha Mikro dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Mandiri Pangan Provinsi Lampung. | Teknis Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Jalur Path | Tingkat ketahanan pangan rumah tangga KA Demapan di Provinsi Lampung termasuk kategori tinggi, yang dapat dilihat dari aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan aspek konsumsi pangan rumah tangga. Berdasarkan hasil analisis variabel keefektifan KA Demapan (Y_2) berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan rumah tangga (Y_3) dengan dibuktikan nilai sign sebesar 0,001 yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Nilai koefisien variabel Y_2 terhadap Y_3 sebesar 0,320. Angka ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keefektifan KA Dmapan terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga sebesar 32,0%. |
| 8 | Sinaga (2015) | Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. | Metode Kuantitatif dengan Analisis Korelasi Pearson, serta Metode <i>One Sample t-test</i> | Secara nilai variabel ketahanan pangan pada daerah penelitian lebih tinggi dibandingkan nilai ketahanan pangan rata-rata untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan nilai perbandingan (64,82% > 62%). |

B. Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan nelayan yang masih rendah memberikan dampak kepada tingkat kemiskinan yang relatif akan tinggi. Hal tersebut merupakan cermin dari tidak kuatnya ketahanan pangan para nelayan. Artinya, meskipun kontribusi sektor pertanian dan perikanan secara keseluruhan sudah terlihat sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun kesejahteraan petani dan nelayan tidak mengalami perubahan.

Sekitar 70 - 80 persen kelompok masyarakat termasuk golongan miskin dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, yang masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber permodalan, menyebabkan masyarakat nelayan di pesisir tidak dapat mengembangkan usahanya secara layak ekonomi.

Akses nelayan ke sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha masih sangat terbatas. Dukungan kredit yang diberikan pemerintah untuk usaha pertanian dalam mendukung kebutuhan modal petani dan nelayan masih terbatas. Kredit yang tersedia selama ini hanya dalam bentuk Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk produsen padi dan tebu. Sementara, jumlah kredit perbankan yang teralokasikan untuk usaha perikanan hanya sekitar 0,02 persen dari total kredit. Sulitnya para nelayan memperoleh persediaan faktor produksi, prasarana dan sarana transportasi sangatlah menghambat pemasaran produk pertanian dan perikanan sehingga menekan harga produk. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum berpihaknya kebijakan ekonomi dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

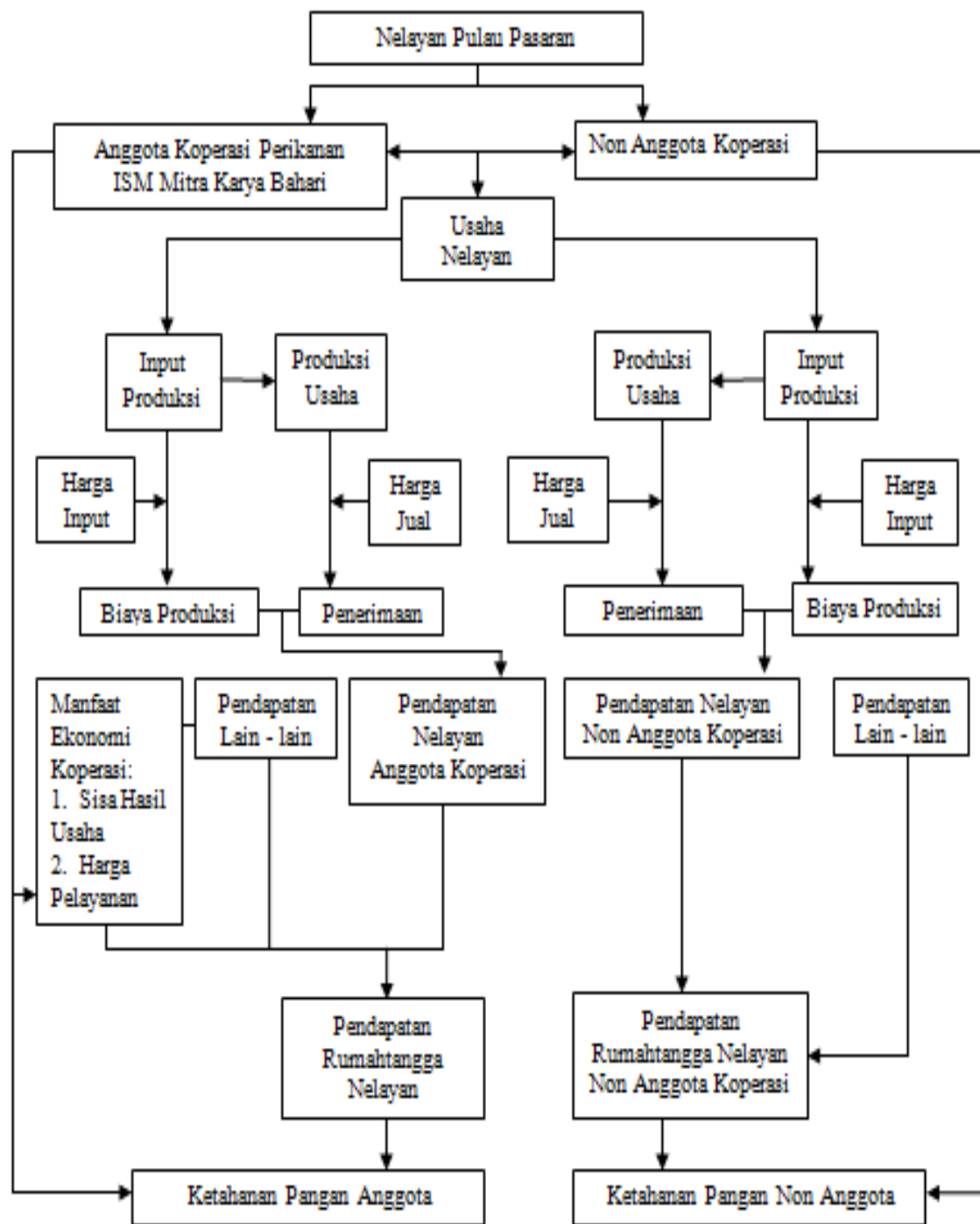
Adanya program diversifikasi pangan yang berkaitan dengan program pembangunan nasional tentu diharapkan tidak lagi adanya kekurangan pendapatan bagi penduduk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Realita di lapangan, para nelayan pada umumnya terkendala oleh masalah modal, sarana produksi, serta harga jual produksinya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian dengan adanya masalah tersebut, salah satu upaya masyarakat pulau pasaran adalah dengan mendirikan koperasi yang mana diharapkan masyarakatnya berpartisipasi menjadi anggota koperasi tersebut.

Para nelayan yang menjadi anggota koperasi memiliki tujuan agar tidak sulit lagi untuk mendapatkan sarana produksi dan dapat menentukan sendiri harga jual hasil produksi dengan keuntungan sesuai yang diharapkan. Pendapatan usaha nelayan menangkap ikan dilaut akan dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Adanya koperasi yang berdiri di Pulau Pasaran akan memberikan manfaat ekonomi berupa manfaat tunai dan manfaat yang diperhitungkan. Manfaat ekonomi koperasi tersebut akan mempengaruhi besarnya pendapatan rumahtangga nelayan. Oleh karena itu, pendapatan rumahtangga nelayan yang menjadi anggota koperasi dan nelayan yang tidak menjadi anggota koperasi diduga akan berbeda, karena adanya pengaruh dari manfaat ekonomi yang didapatkan dari koperasi tersebut.

Manfaat ekonomi koperasi didapatkan dari memanfaatkan fasilitas pelayanan yang disediakan oleh koperasi yang dibangun yaitu dengan usaha warung serba ada (Waserda) dan manfaat tunai yang didapatkan anggota koperasi berupa sisa hasil usaha (SHU). Dengan adanya fasilitas pelayanan yang

diberikan koperasi terhadap anggotanya maka perlu perhatian khusus tentang seberapa besar manfaat ekonomi koperasi yang diperoleh oleh anggota sehingga dapat dibandingkannya pendapatan para nelayan yang telah berpartisipasi menjadi anggota koperasi dengan nelayan yang belum menjadi anggota koperasi.

Melihat perbandingan pendapatan yang diterima oleh nelayan, tidak lepas dari tingkat pangan yang nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian akan diteliti tingkat ketahanan pangan para nelayan anggota koperasi dan non anggota koperasi jika diperhitungkan dari pendapatan yang diterima oleh nelayan, maka akan terlihat faktor apa saja yang akan mempengaruhi ketahanan pangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kerangka pemikiran analisis pengaruh status keanggotaan Koperasi Perikanan Ikhtiar Swadaya Masyarakat (ISM) Mitra Karya Bahari terhadap pendapatan rumah tangga dan ketahanan pangan nelayan.

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga status keanggotaan nelayan sebagai anggota koperasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha nelayan.
2. Diduga status keanggotaan nelayan sebagai anggota koperasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan rumahtangga nelayan.
3. Diduga status keanggotaan nelayan sebagai anggota koperasi berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan rumahtangga.
4. Diduga ada pengaruh positif antara pendapatan usaha nelayan (X_1), pendapatan lain-lain (X_2), manfaat ekonomi (X_3) dan status keanggotaan (D_1) terhadap tingkat ketahanan pangan nelayan.

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, data yang dipelajari diambil dari populasi tersebut sehingga dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variabel. Survei pada umumnya merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam jangka waktu yang bersamaan dalam jumlah besar dan luas. Pada penelitian ini menerapkan survei sampel yaitu sampel yang dimasukkan dalam penelitian yang merupakan bagian dari suatu populasi (Wirartha, 2005).

B. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai variabel yang akan diteliti untuk memperoleh dan menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian.

Anggota Koperasi adalah orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha

koperasi dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku anggota

Nelayan adalah orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan laut lainnya yang hidup di dasar maupun di permukaan perairan, baik yang melaut dengan kapal sendiri ataupun tidak.

Usaha nelayan adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal perairan laut (pantai dan laut lepas), dihitung dalam satuan kilogram (Kg).

Produksi diartikan sebagai usaha untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi suatu sumberdaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual (Mulyadi, 1995), diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Harga ikan adalah harga yang diterima oleh nelayan atas penjualan ikan yang diukur dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

Penerimaan usaha nelayan adalah hasil yang diperoleh nelayan dari penjualan ikan sebagai hasil produksi dikalikan dengan harga jual diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/ tahun).

Biaya tetap usaha nelayan adalah jumlah uang yang pasti dikeluarkan nelayan setiap tahunnya yang meliputi surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin pe-

nangkapan ikan (SIPI), surat izin berlayar (Pas biru), dan biaya penyusutan asset tetap dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Izin Penangkapan Ikan adalah izin tertulis atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Biaya penyusutan asset tetap adalah nilai asset yang menurun sehingga menurunkan jumlah asset tetap yang dimiliki (Rp).

Biaya variabel usaha nelayan adalah jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan didasarkan pada volume produksi yang meliputi solar/bensin, es, garam, dan konsumsi saat melaut dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Biaya bahan bakar merupakan biaya variabel yang dikeluarkan untuk suatu materi yang berubah menjadi energi yang digunakan kapal untuk beroperasi yang dihitung dalam satuan liter per hari (liter/hr).

Biaya konsumsi adalah biaya variabel yang dikeluarkan untuk makanan atau minuman saat melaut (Rp)

Biaya total usaha nelayan adalah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh nelayan untuk melakukan usaha meliputi biaya tetap dan biaya tidak tetap/variabel dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Pendapatan usaha nelayan adalah penerimaan yang diperoleh nelayan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, dalam hal ini biaya bahan bakar, alat tangkap, konsumsi, perawatan alat, umpan dan biaya penyusutan alat-alat menangkap ikan dalam satu kali tangkap ikan. Pendapatan nelayan diukur dalam satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Pendapatan lain-lain adalah seluruh pendapatan keluarga nelayan yang berasal dari usaha non usahatani dan non koperasi setelah dikurangi dengan pengeluaran tunai yang diukur dalam satuan rupiah pertahun (Rp/th).

Pendapatan rumahtangga adalah jumlah uang yang diperoleh dari koperasi, usahatani perikanan, serta non perikanan dan non koperasi setelah dikurangi dengan biaya, yang diukur dengan satuan rupiah per tahun (Rp/th).

Manfaat ekonomi koperasi adalah manfaat yang dapat dirasakan oleh nelayan sebagai anggota koperasi, baik tunai maupun yang diperhitungkan secara ekonomi.

Manfaat ekonomi koperasi tunai adalah Sisa Hasil Usaha (Sisa Hasil Usaha) yang diterima nelayan anggota koperasi dari koperasi, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Manfaat ekonomi koperasi yang diperhitungkan adalah harga pelayanan dikalikan jumlah faktor produksi, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Harga pelayanan adalah selisih harga faktor produksi yang berlaku di koperasi dengan harga yang berlaku di luar koperasi, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Sisa Hasil Usaha adalah SHU bagi anggota yang diterima oleh nelayan anggota koperasi, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan rumahtangga nelayan secara subjektif didasarkan dari persepsi rumahtangga nelayan terhadap kondisi ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan rumahtangganya untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari.

Ketersediaan pangan rumahtangga nelayan adalah kondisi ketersediaan pangan rumahtangga nelayan yang dilihat dari pengetahuan anggota rumahtangga nelayan tentang kecukupan ketersediaan pangan dan stabilitas ketersediaan pangan rumah tangganya tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.

Distribusi pangan nelayan adalah aksesibilitas/keterjangkauan rumahtangga nelayan dalam mendapatkan bahan pangan, yang di lihat dari kemudahan ruma tangga nelayan memperoleh pangan dan cara rumahtangga nelayan memperoleh bahan pangan.

Konsumsi pangan rumahtangga nelayan adalah kondisi bahan pangan yang dikonsumsi rumahtangga nelayan, yang diukur dari pengetahuan anggota rumahtangga nelayan tentang pangan yaitu mengenai kualitas pangan yang dikonsumsinya dan kemampuan dalam memilih pangan yang sesuai dengan kebutuhan/kecukupan rumahtangga nelayan, sehingga aman untuk dikonsumsi.

C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal nelayan yaitu Pulau Pasaran dan Koperasi Perikanan Ikhtiar Swadaya Masyarakat (ISM) Mitra Karya Bahari, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Pemilihan dilakukan dengan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari merupakan koperasi pertanian yang berprestasi pada tahun 2014 (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung, 2014). Selain itu, di Pulau Pasaran ini masih terdapat masyarakat nelayan yang belum tergabung menjadi anggota koperasi yang akan menjadi responden pembanding pendapatan dan tingkat ketahanan pangan antar anggota dan non anggota koperasi.

Menurut hasil prasarvei yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara bersama ketua koperasi dan dibuktikan dengan data yang ada, populasi di Pulau Pasaran berjumlah 263 kepala keluarga. Dari jumlah populasi tersebut, 136 orang sudah berstatus sebagai anggota Koperasi

Perikanan Ikhtiar Swadaya Masyarakat ISM Mitra Karya Bahari dan sisanya 127 orang belum berstatuskan anggota koperasi. Mata pencaharian masyarakat Pulau Pasaran terdiri dari kelompok usaha antara lain kelompok pengolah ikan tangkap (pengasin ikan), kelompok penangkap ikan (nelayan) baik yang menggunakan bagan ataupun yang menggunakan pancingan, kelompok ibu-ibu pengolah produk turunan teri, dan kelompok buruh.

Responden yang diambil dalam penelitian ini ialah nelayan kelompok penangkap ikan (nelayan) baik yang menggunakan bagan ataupun yang menggunakan pancingan dengan jumlah populasi nelayan sebanyak 159 nelayan. Nelayan yang tergabung menjadi anggota koperasi sebanyak 86 nelayan, sedangkan sisanya 73 nelayan tidak tergabung menjadi anggota koperasi. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode acak sederhana dengan menggunakan rumus perhitungan sampel menurut Sugiarto (2003) diperoleh hasil sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S}{Nd^2 + Z^2S^2} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi 159 (orang)
- Z = Tingkat kepercayaan 95 % (1,96)
- S = Varian sampel (5%)
- d = Derajat penyimpangan (5%)

Dengan Perhitungan:

$$\begin{aligned} n &= \frac{159 (1,96)^2 (0,05)}{159 (0,05)^2 + (1,96)^2 (0,05)^2} \\ &= 65 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas diperoleh jumlah sampel sebanyak 65 nelayan. Untuk menentukan banyaknya sampel yang diambil untuk anggota koperasi dan non anggota koperasi digunakan rumusan alokasi proporsional dari Sugiyono (2011) adalah sebagai berikut:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

n_i = jumlah sampel kelompok yang diambil

n = jumlah sampel seluruhnya

N_i = jumlah populasi menurut kelompok

N = jumlah populasi seluruhnya

Dengan perhitungan:

$$N_{\text{anggota}} = \frac{86}{159} \times 65$$

$$= 35 \text{ nelayan}$$

$$N_{\text{non-anggota}} = \frac{73}{159} \times 65$$

$$= 30 \text{ nelayan}$$

D. Jenis Data dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara wawancara dengan petani (responden) melalui penggunaan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari lembaga/instansi terkait, laporan-laporan, publikasi, dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan jenis data di atas, maka teknik untuk memperoleh data penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu dilakukan secara langsung dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan kuesioner yang disiapkan.



Gambar 4. Dokumentasi wawancara bersama nelayan Pulau Pasaran.

2. Pengamatan langsung, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.



Gambar 5. Dokumentasi pengamatan langsung pengambilan data penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat data yang sudah tersedia di kantor/ instansi terkait dengan penelitian.

E. Metode Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Analisis Pendapatan Usaha Nelayan

a. Pendapatan Usaha Nelayan

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan anggota dan non anggota koperasi. Pendapatan diperoleh dengan menghitung selisih antara penerimaan yang diterima dari hasil usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Menurut Soekartawi (1995), menyatakan persamaan untuk memperoleh pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\pi = Y \cdot P_y - \sum X_i \cdot P_{xi} - BTT \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan:

- Π = Pendapatan (Rp)
- Y = Hasil produksi (Kg)
- P_y = Harga hasil produksi (Rp)
- X_i = Faktor produksi ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)
- P_{xi} = Harga faktor produksi ke- i (Rp)
- BTT = Biaya tetap total (Rp)

Pendapatan usaha ikan tangkap nelayan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya gelombang air laut. Tinggi rendahnya gelombang disebabkan karena adanya pergantian musim yang terjadi dalam setiap tahun, yaitu musim barat, musim normal, dan musim timur.

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Juni 2015, sehingga data

yang diambil merupakan data pendapatan nelayan mulai dari bulan Agustus 2014 hingga Juli 2015.

b. *Revenue Cost Ratio*

Analisis dilanjutkan dengan menghitung perbandingan antara penerimaan total biaya dan biaya total dengan menggunakan R/C rasio (*Revenue Cost Ratio*). R/C rasio digunakan untuk mengetahui rasio keuntungan nelayan terhadap biaya yang dikeluarkan pada usaha perikanan, secara matematis dapat ditulis (Soekartawi, 1995):

$$\mathbf{R/C} = \mathbf{PT/BT} \dots\dots\dots(6)$$

$$\mathbf{R/C \text{ rasio}} = \mathbf{Py.y/FC+VC} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan:

| | |
|-----|---|
| R/C | = Nisbah antara penerimaan dengan biaya |
| PT | = Penerimaan Total |
| BT | = Biaya Total yang dikeluarkan |
| Py | = Harga Output (Rp/Kg) |
| y | = Output (Kg) |
| FC | = Biaya Tetap |
| VC | = Biaya Variabel |

Jika $R/C > 1$, maka usaha yang diusahakan menguntungkan karena penerimaan lebih besar daripada biaya total. Jika $R/C = 1$, maka usaha yang dilakukan berada pada titik impas (*break event point*), yaitu dimana besarnya penerimaan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jika $R/C < 1$, maka usaha yang dilakukan tidak menguntungkan karena penerimaan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan.

c. Pengujian Perbedaan Pendapatan Usaha Nelayan

Uji hipotesis yang dilakukan pada pendapatan usaha nelayan menggunakan analisis regresi yang kemudian dilakukan uji statistik t (t-test). Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan adanya pengaruh satu dummy sebagai berikut:

$$Y = a + bD \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan Usaha Nelayan (Rp)
- a = Konstanta regresi atau intersep
- b = Koefisien regresi
- D = (1) anggota
(0) non-anggota

Menurut Ghozali (2006), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian berikut ini :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$, maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Manfaat Ekonomi Koperasi

Manfaat ekonomi koperasi diketahui dengan melakukan wawancara khusus kepada masyarakat Pulau Pasaran yang menjadi responden anggota koperasi terkait seberapa besar harga pelayanan yang diterima dari koperasi serta sisa hasil usaha yang diterima sebagai anggota koperasi. Orientasi pelayanan yang diarahkan kepada anggota menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh anggota koperasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat ekonomi koperasi dibagi menjadi manfaat ekonomi koperasi tunai dan manfaat ekonomi koperasi diperhitungkan. Manfaat ekonomi tunai berupa sisa hasil usaha, sedangkan manfaat ekonomi koperasi diperhitungkan berupa harga pelayanan yang didapat dari selisih harga faktor produksi yang disediakan didalam waserda koperasi.

$$\text{MEK} = \text{HP} + \text{SHU} \dots\dots\dots(9)$$

$$\text{HP} = \text{HK} - \text{HBK} \dots\dots\dots(10)$$

Keterangan:

MEK = Manfaat Ekonomi Koperasi

HP = Harga Pelayanan

SHU = Sisa Hasil Usaha

HK = Harga Koperasi

HBK = Harga Bukan Koperasi

3. Analisis Pendapatan Rumah tangga

Pendapatan rumah tangga petani anggota koperasi diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan keluarga dari usaha nelayan, manfaat ekonomi,

dan pendapatan keluarga yang berasal dari luar usaha nelayan, dengan rumus sebagai berikut:

$$P_{rt} = P_{usahanelayan} + P_{manfaat\ ekonomi} + P_{lain-lain} \dots\dots\dots(11)$$

Keterangan :

- P_{rt} = Pendapatan Rumahtangga
 $P_{usahanelayan}$ = Pendapatan usaha nelayan
 $P_{manfaat\ ekonomi}$ = Manfaat Ekonomi
 $P_{lain-lain}$ = Pendapatan di luar usaha nelayan

Struktur pendapatan rumahtangga petani anggota koperasi dapat dilihat dalam persen (%) dengan contoh tabel seperti ini:

| Sumber | Nilai (Rp) | Persen (%) |
|----------------------------------|------------|------------|
| Pendapatan usaha nelayan | | |
| Manfaat ekonomi koperasi tunai | | |
| Pendapatan di luar usaha nelayan | | |
| Jumlah | | |

Untuk mengetahui pengaruh status keanggotaan terhadap pendapatan rumahtangga nelayan anggota dan non anggota koperasi maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi. Analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan adanya pengaruh satu dummy sebagai berikut:

$$Y = a + bD \dots\dots\dots(12)$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan rumahtangga nelayan
 a = Konstanta regresi atau intersep
 b = Koefisien regresi
 D = (1) anggota
(0) non-anggota

Menurut Ghozali (2006), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian berikut ini :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$, maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

4. Analisis Ketahanan Pangan Nelayan

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Dalam kuesioner atau instrumen ketahanan pangan dalam penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan alat bantu komputer melalui program SPSS.

1) Validitas Instrumen

Validitas (kesahihan) mempunyai arti ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur/instrumen dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Validitas menunjukkan sejauhmana

sejauhmana suatu alat ukur itu mengukur apa yang ingin diukur.

Oleh karena itu kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini harus valid (Ancok, 1989).

Langkah-langkah uji validitas instrumen yang dilakukan adalah:

- a) Mendefinisikan secara operasional konsep peubah yang akan diukur berdasarkan referensi literatur dan kunsultasi dengan pakar atau dosen pembimbing.
- b) Melakukan uji coba instrumen pada sebagian responden.
- c) Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban
- d) Menghitung korelasi antara setiap item pertanyaan/ pertanyaan dengan skor total, menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan bandtuan program SPSS.
- e) Membandingkan angka korelasi dengan angka kritis pada tabel korelasi nilai r pada taraf tertentu (5%).

Apabila angka korelasi yang dihasilkan lebih besar daripada angka korelasi pada tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Rumus *product moment* sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n(\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{n(\sum y^2) - (\sum y)^2\}}} \dots\dots(13)$$

Keterangan:

- r_{xy} = korelasi *product moment*
 x = skor per item dalam suatu variabel
 y = skor total item dalam suatu variabel
 n = jumlah responden
 (Sugiyono, 2011).

2) *Reliabilitas Instrumen*

Reliabilitas (keterandalan) adalah alat ukur yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan yang diperoleh dari para obyek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda. Artinya reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.

Tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh angka yang disebut sebagai koefisien reliabilitas. Koefisien keandalan alat ukur ini menunjukkan tingkat konsisten jawaban responden, yang nilai koefisien alfa antara 1 dan 0. Semakin mendekati 1 nilai koefisien alfa, maka semakin baik alat ukurnya. Teknik uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *uji cronbach alpha*. Teknik ini digunakan untuk menguji instrumen dengan alternatif jawaban per butir pertanyaan > 2 (lebih dari 2).

Rumus *uji cronbach alpha*:

$$r = \frac{k}{k-1} \left\{ 1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right\} \dots\dots\dots(14)$$

Keterangan:

r = koefisien *alpha cronbach*
 k = banyaknya item
 $\sum s_i^2$ = jumlah varians item
 S_t^2 = varians total

Rumus untuk varians total dan varians item:

$$s_t^2 = \frac{\sum x_t^2}{n} - \frac{(\sum x_t)^2}{n} \dots\dots\dots(15)$$

$$\sum s_i^2 = \frac{JK_i}{N} - \frac{JK_s}{n^2} \dots\dots\dots(16)$$

Hasil dari uji reliabilitas didapat dari perhitungan menggunakan program SPSS, dan pengujian reliabilitas menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha*, dikatakan reliabel dengan standar dapat diterima jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,7.

b. Method of Succesive Interval (MSI)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan data yang dapat dianalisis setidaknya adalah data interval. Dengan demikian pada penelitian ini data ordinal perlu dirubah menjadi data interval. Untuk mengubah data ordinal menjadi data interval digunakan *Method of Succesive Interval* (MSI) (Muhidin, 2011). Pada penelitian ini mengubah data ordinal menjadi data interval dilakukan secara komputerisasi dengan pertimbangan proses pengubahan data akan lebih praktis dan waktu yang dibutuhkan lebih singkat.

c. Pengukuran Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan nelayan dalam penelitian ini diukur secara subyektif. Ukuran subjektif menurut Pakpahan dan Pasandaran (1990) yaitu ukuran ketahanan pangan yang didasarkan pada opini, pandangan, sikap atau pendapat rumahtangga nelayan terhadap situasi pangannya yaitu mengenai ketersediaan pangan rumahtangga nelayan, distribusi pangan rumahtangga nelayan dan konsumsi bahan pangan rumahtangga nelayan. Variabel, parameter, indikator dan pengukuran tingkat ketahanan pangan rumahtangga nelayan yang mengacu kepada Rangga (2014) dapat dilihat pada Tabel 7.

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketersediaan pangan rumah tangga adalah kondisi ketersediaan pangan rumah tangga anggota koperasi, yang diukur dari peningkatan pengetahuan ketersediaan pangan, dan stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim.
- b. Distribusi pangan adalah aksesibilitas/keterjangkauan rumah tangga dalam mendapatkan bahan pangan, yang diukur dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, dan cara mudah rumahtangga memperoleh pangan.
- c. Konsumsi pangan rumah tangga adalah kondisi bahan pangan yang dikonsumsi rumah tangga, yang diukur dari pengetahuan anggota koperasi tentang pangan yang berguna bagi tubuh (berkualitas), dan

kemampuan memilih pangan yang sesuai dengan kebutuhan atau kecukupan, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Tabel 7. Variabel, Parameter, Indikator, dan Pengukuran Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Anggota Koperasi

| Variabel | Parameter | Indikator | Kriteria Pengukuran | Skor |
|---|---|---|----------------------|------|
| Keta- hanan Pangan Rumah Tangga | 1. Keter- sediaan pangan | 1. Peningkatan pengetahuan tentang ke- tersediaan pangan ru- mah tangga. | 1. Sangat rendah | 1 |
| | | | 2. Rendah | 2 |
| | | | 3. Cukup tinggi | 3 |
| | | | 4. Tinggi | 4 |
| | | | 5. Sangat tinggi | 5 |
| | 2. Stabilitas ketersediaan (cadangan pangan) pangan di rumah tangga | 1. Tidak stabil | 1. Tidak stabil | 1 |
| | | | 2. Kurang stabil | 2 |
| | | | 3. Cukup stabil | 3 |
| | | | 4. Stabil | 4 |
| | | | 5. Sangat stabil | 5 |
| 2. Distribusi pangan | 1. Aksesibili- tas/keterjang- kauan rumah tangga terha- dap pangan | 1. Tidak terjangkau | 1. Tidak terjangkau | 1 |
| | | | 2. Sedikit | 2 |
| | | | 3. Cukup terjangkau | 3 |
| | | | 4. Terjangkau | 4 |
| | | | 5. Sangat terjangkau | 5 |
| | 2. Cara mudah rumah- tangga nelayan memperoleh pangan | 1. Tidak mudah | 1. Tidak mudah | 1 |
| | | | 2. Kurang | 2 |
| | | | 3. Cukup mudah | 3 |
| | | | 4. Mudah | 4 |
| | | | 5. Sangat mudah | 5 |
| 3. Konsum- si pangan | 1. Peningkatan pengetahuan tentang pa- ngan yang berkualitas | 1. Sangat rendah | 1. Sangat rendah | 1 |
| | | | 2. Rendah | 2 |
| | | | 3. Cukup tinggi | 3 |
| | | | 4. Tinggi | 4 |
| | | | 5. Sangat tinggi | 5 |
| | 2. Kemampuan memilih pa- ngan ber- kualitas un- tuk dikon- sumsi | 1. Tidak mampu | 1. Tidak mampu | 1 |
| | | | 2. Kurang mampu | 2 |
| | | | 3. Cukup mampu | 3 |
| | | | 4. Mampu | 4 |
| | | | 5. Sangat mampu | 5 |

Kuesioner dalam penelitian ini disusun berdasarkan parameter ketahanan pangan. Penilaian didasarkan pada persepsi dan penilaian responden terhadap pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Skala pengukuran untuk variabel ketahanan pangan adalah skala likert dengan skor pada setiap indikator dengan skala likert jenjang 5 (1,2,3,4,5) maka data yang diperoleh data ordinal, oleh karena itu perlu terlebih dahulu dirubah menjadi data interval terhadap data aslinya, baru dilakukan analisis regresi yang diperlukan. Agar analisis tersebut dapat dilanjutkan, maka skala pengukuran ordinal harus dinaikkan (ditransformasikan) ke dalam skala interval dengan menggunakan *Methods Successive Interval* (MSI).

Untuk mengetahui pengaruh status keanggotaan terhadap ketahanan pangan rumah tangga nelayan anggota dan non anggota koperasi maka dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi. Analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan adanya pengaruh satu dummy sebagai berikut:

$$Y = a + bD \dots\dots\dots(17)$$

Keterangan:

- Y = Ketahanan pangan rumah tangga nelayan
- a = Konstanta regresi atau intersep
- b = Koefisien regresi
- D = (1) anggota
(0) non-anggota

Menurut Ghazali (2006), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam me-

nerangkan variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian berikut ini :

- 1) Jika nilai signifikan $> 0,05$, maka hipotesis ditolak, yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Ini berarti bahwa secara parsial, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$, maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

d. Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Nelayan

Untuk menjawab tujuan ke lima, analisis yang digunakan adalah *logistik regression*. Model logit adalah model regresi non-linier dimana variabel dependen bersifat kategorikal. Kategori paling dasar dari model logit menghasilkan *binary values* seperti angka 0 dan 1 sehingga sering disebut binary logit.

Regresi logit merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk mencari hubungan antara peubah respon bersifat kategorik berskala nominal atau ordinal dengan satu atau lebih peubah penjelas kontinyu maupun kategorik. Jika peubah respon berskala nominal digunakan regresi logistik multinomial, sedangkan pada peubah respon berskala ordinal digunakan regresi logistik ordinal. Pendugaan parameter model

regresi logistik multinomial dan ordinal dilakukan dengan metode *Maximum Likelihood Estimation* (Widarjono, 2010).

Model logit membuat probabilitas tergantung dari variabel-variabel yang diobservasi, yaitu X_1 , X_2 , dan seterusnya. Tujuan dari estimasi ini adalah untuk menemukan nilai terbaik bagi masing-masing koefisien (Kuncoro, 2004). Variabel-variabel *independent* model terdiri pendapatan usaha nelayan (X_1), pendapatan lain-lain (X_2), manfaat ekonomi koperasi (X_3) dan status keanggotaan (D_1). Metode pengolahan data dilakukan dengan metode tabulasi, komputerisasi (*Microsoft Excell*), dan *spss*.

Model logit dinyatakan sebagai :

$$P_i = F(Z_i) = F(\alpha + \beta X_i) \dots\dots\dots (18)$$

$$P_i = 1/(1+e^{-Z_i}) \dots\dots\dots (19)$$

$$P_i = 1/(1+e^{-(\alpha + \beta X_i)}) \dots\dots\dots (20)$$

Jika kedua sisi persamaan dikalikan $1+e^{-Z_i}$ maka diperoleh :

$$(1+e^{-Z_i}) P_i = 1 \dots\dots\dots (21)$$

$$e^{-Z_i} = 1 / P_i - 1 = \frac{P_i}{1-P_i} \dots\dots\dots (22)$$

Karena $e^{-Z_i} = 1 / e^{Z_i}$ maka:

$$e^{-Z_i} = \frac{P_i}{1-P_i} \text{ (Rasio Odds)} \dots\dots\dots (23)$$

Persamaan regresi ordinal logit dinyatakan sebagai berikut :

$$P_i = F(Z_i) = F(\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + d_1 D_1 + e) \dots\dots\dots (24)$$

Dimana untuk mencari Z_i digunakan rumus :

$$Z_i = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + d_1 D_1 + e \dots\dots\dots (25)$$

Keterangan :

- Z_i = Peluang nelayan untuk menentukan tingkat ketahanan pangan, dimana
 Z_1 = Peluang nelayan untuk berada pada tingkat tahan pangan
 Z_0 = Peluang nelayan untuk berada pada tingkat tidak tahan pangan
 P_i = Peluang nelayan untuk menentukan tingkat ketahanan pangan bila X_i diketahui
 α = Intersep
 $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien variabel bebas
 X_1 = Pendapatan usaha nelayan
 X_2 = Pendapatan lain-lain
 X_3 = Manfaat ekonomi
 D_1 = Status Keanggotaan
 (1) = anggota
 (2) = non-anggota
 e = error term

Estimasi model logit dilakukan uji serentak yaitu dengan menggunakan *Likelihood Ratio* (LR) yang setara dengan F-stat dan berfungsi untuk menguji apakah semua slope koefisien regresi variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Widarjono, 2010).

Hipotesis dalam pengujian *Likelihood Ratio* adalah:

- H_0 = semua variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen
 H_1 = semua variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen

H_0 ditolak jika *Probability Likelihood Ratio* $< \alpha$, dan H_0 diterima jika *Probability Likelihood Ratio* $> \alpha$. Selanjutnya, dilakukan uji parsial

(Zstat) yaitu dengan menggunakan *Wald Test*. Hipotesis dalam pengujian

Wald Test adalah :

H₀ = variabel independen yang diuji secara individu tidak
berpengaruh nyata terhadap variabel dependen

H₁ = variabel independen yang diuji secara individu berpengaruh
nyata terhadap variabel dependen

H₀ ditolak jika *Probability Wald* < α , dan H₀ diterima jika *Probability Wald* > α . Untuk melihat seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan independennya dilakukan uji *Goodness Of Fit*. Pada regresi logistik, koefisien determinasi (R²) yang digunakan adalah *McFadden Rsquare*, yaitu *R-square* tiruan (Widarjono, 2010).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur

1. Keadaan Geografis

Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Pada awalnya Kelurahan Kota Karang masuk dalam Kecamatan Teluk Betung Barat. Pada tahun 2012 pemerintah memekarkan beberapa wilayah di Bandar Lampung sehingga Kelurahan Kota Karang saat ini termasuk ke dalam Kecamatan Teluk Betung Timur. Wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu :

- a) Kelurahan Kota Karang
- b) Kelurahan Kota Karang Raya
- c) Kelurahan Perwata
- d) Kelurahan Keteguhan
- e) Kelurahan Sukamaju
- f) Kelurahan Way Tataan

Teluk Betung Timur memiliki luas wilayah 1.210 ha dan jumlah penduduk 38.408 jiwa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung

Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, letak geografis dan wilayah administratif Kecamatan Teluk Betung Timur berasal dari sebagian wilayah geografis dan administratif Kecamatan Teluk Betung Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Selatan
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat

2. Keadaan Iklim

Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 160,08 sampai dengan 168,66 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/bulan. Kecamatan Teluk Betung Timur terdiri atas wilayah perbukitan, dataran rendah dan pantai dengan suhu rata-rata 28⁰ C. Daerah Kecamatan Teluk Betung Timur rata-rata memiliki tekanan udara minimal dan maksimal adalah 980,64 Nbs dan 1.023,26 Nbs, informasi diperoleh dari data Kecamatan Teluk Betung Timur, 2012 (tidak dipublikasikan).

3. Keadaan Umum Demografi

Jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Timur menurut hasil proyeksi tahun 2010 – 2011 berjumlah 35.073 jiwa, yang terdiri dari 20.156 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 14.917 jiwa penduduk

berjenis kelamin perempuan, informasi diperoleh dari data Kecamatan Teluk Betung Timur, 2012 (tidak dipublikasikan).

4. Keadaan Umum Perikanan

Kecamatan Teluk Betung Timur merupakan daerah yang mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Kecamatan Teluk Betung Timur berbatasan langsung dengan Teluk Lampung, sehingga akses penduduk dalam melakukan aktivitas di bidang perikanan menjadi lebih mudah. Wilayah pesisir di Kecamatan Teluk Betung Timur memiliki potensi sumberdaya perikanan yang tinggi, baik untuk pengembangan budidaya perikanan maupun kegiatan penangkapan ikan. Saat ini, tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan di Kecamatan Teluk Betung Timur masih belum optimal. Sistem penangkapan ikan oleh nelayan di Kecamatan Teluk Betung Timur masih bersifat terbatas pada perairan pantai. Menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung hal tersebut dikarenakan kurangnya pembinaan dari pemerintah dan kurangnya program yang dikhususkan untuk para nelayan serta belum dibangunnya sistem informasi yang dapat diakses oleh nelayan dengan mudah dan cepat.

Teluk Lampung merupakan pelabuhan perikanan yang berada di Selatan Pulau Sumatera. Masyarakat nelayan hanya mengandalkan pengalaman dan kebiasaan dalam menangkap ikan, tanpa didukung oleh data-data informasi yang akurat mengenai daerah penangkapan ikan yang potensial. Selain itu, fasilitas armada penangkapan ikan juga masih terbatas, baik dari ukuran, maupun jumlahnya, sehingga belum dapat menjangkau daerah

penangkapan ikan yang potensial. Hal ini menjadi kendala bagi pengembangan usaha ikan tangkap karena armada penangkapan yang digunakan memiliki kapasitas penangkapan yang kecil dan daya jelajah perairan yang terbatas, sehingga tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan menjadi terbatas (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, 2006).

B. Keadaan Umum Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Kota Karang merupakan salah satu dari 6 kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Timur. Jarak Kelurahan Kota Karang ke Ibukota Kecamatan Teluk Betung Timur kurang lebih 0,75 km dan jarak Kelurahan Kota Karang ke Ibukota Bandar Lampung kurang lebih 3,50 km. Pada Tahun 1980, Kelurahan Kota Karang dibuka oleh Pangeran Tanun Dewangsa dan Pangeran Tanun Jaya beserta keluarga. Kota Karang berasal dari nama aslinya yaitu “Kuta Kakhang” yang berartikan “Pagar Karang”, karena kelurahan ini berada di pinggir pantai Teluk Lampung yang dipagari dengan batu karang. Batas-batas Kelurahan Kota Karang secara administratif adalah:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Permata
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut/Teluk Lampung
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Keteguhan
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Way Belau

2. Keadaan Iklim dan Demografi

Topografi Kelurahan Kota Karang adalah berupa daratan yang letaknya di pesisir pantai. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 196,78 sampai 230,00 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/bulan. Rata-rata tekanan udara daerah Kelurahan Kota Karang minimal dan maksimal adalah 980,67 Nbs dan 1.046,58 Nbs. Jumlah penduduk Kelurahan Kota Karang adalah 14.745 jiwa dengan mata pencaharian utama adalah nelayan. Berdasarkan pekerjaan, 68 persen penduduk Kelurahan Kota Karang adalah nelayan, sedangkan 32 persennya adalah buruh nelayan, pengasin ikan, pedagang, dan ojek motor, informasi diperoleh dari data Kecamatan Teluk Betung Timur, 2012 (tidak dipublikasikan).

C. Keadaan Umum Pulau Pasaran

1. Keadaan Geografis

Pulau Pasaran adalah sebuah pulau di Kelurahan Kota Karang RT. 09 Lingkungan 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jarak dari Pulau Pasaran ke Kecamatan Kota Karang sekitar 1 km dengan waktu tempuh sekitar 25 menit. Luas Pulau Pasaran saat ini sekitar 12 ha. Menurut sejarah luas awal pulau ini hanya 2 ha, luas pulau semakin bertambah karena populasi penduduk yang meningkat. Perluasan pulau dilakukan dengan cara menimbun pantai dengan pasir dan karang. Keseluruhan lahan di Pulau Pasaran digunakan untuk berbagai kegiatan, 60

persen lahan digunakan untuk tempat penjemuran ikan teri sedangkan sisanya 40 persen digunakan untuk pemukiman, bangunan, jalan, tempat pemakaman, sarana pendidikan, ibadah dan lapangan.

2. Keadaan Iklim Pulau Pasaran

Pulau Pasaran merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 196,78 sampai 230,00 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan 10 hari/bulan. Letaknya yang tepat berada di Pesisir Pantai Teluk Lampung menyebabkan sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Melaut untuk menangkap ikan merupakan tugas pokok nelayan supaya mendapatkan penghasilan. Iklim akan mempengaruhi nelayan untuk pergi melaut. Tingginya gelombang laut akan menjadi perhatian para nelayan untuk pergi melaut menangkap ikan.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim, tiupan angin yang kencang akan mempengaruhi tingginya gelombang air laut. Musim angin yang terjadi setiap tahunnya ada tiga yaitu musim barat dan musim normal masing-masing berlangsung selama tiga bulan dan sisanya enam bulan diperkirakan terjadi musim timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan, musim yang terjadi pada saat penelitian ini tidak seperti perkiraan yang telah ditetapkan seperti sebelumnya. Tiupan angin dan tinggi rendahnya gelombang air laut yang terjadi pada daeran perairan Teluk Lampung yaitu antara bulan Agustus 2014 hingga Juli 2015 terjadi tiga musim yang dialami oleh nelayan. Musim barat terjadi antara bulan

Agustus hingga November 2014, musim timur terjadi antara bulan Desember 2014 hingga Maret 2015 dan musim normal terjadi antara bulan April hingga Juli 2015. Hasil wawancara dan pengamatan langsung telah disesuaikan dengan data peringatan dini (*early warning*) gelombang tinggi dari bidang informasi meteorologi maritim tahun 2014 – 2015 menurut BMKG, 2015 (tidak dipublikasikan).

3. Keadaan Topografi dan Demografi

Pulau Pasaran terletak di dataran dengan suhu rata-rata 37⁰ C, dengan ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah di Pulau Pasaran adalah jenis tanah berpasir dengan ciri lapisan tanah berwarna putih kemerah-merahan.

Pulau Pasaran memiliki jumlah penduduk total pada tahun 2012 sebanyak 1.123 jiwa. Penduduk di Pulau Pasaran terdiri atas laki-laki sebanyak 571 jiwa dan perempuan sebanyak 552 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, tahun 2012.

| Kelompok Umur (tahun) | Jumlah (jiwa) | Persentase (%) |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 0--4 | 90 | 8,01 |
| 5--6 | 34 | 3,03 |
| 7--13 | 184 | 16,38 |
| 14--16 | 76 | 6,77 |
| 17--24 | 181 | 16,12 |
| 25--54 | 473 | 42,12 |
| 55 ke atas | 85 | 7,57 |
| Jumlah | 1.123 | 100,00 |

Sumber : Monografi Pulau Pasaran, 2012 (tidak dipublikasikan)

4. Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang sosial dan ekonomi yang terdapat di Pulau Pasaran antara lain sarana pendidikan berupa satu buah bangunan Sekolah Dasar (SD), tempat ibadah berupa satu buah mushala dan satu buah masjid, sarana kesehatan berupa satu buah Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa), tempat pemakaman, satu buah balai untuk pertemuan warga, dan satu buah koperasi, yaitu Koperasi ISM Mitra Karya Bahari.

Sarana penunjang perekonomian pengolah di Pulau Pasaran adalah kapal yang biasa digunakan pengolah untuk melakukan transaksi jual beli ikan segar di bagan yang letaknya di tengah-tengah laut. Pulau Pasaran juga memiliki alun pantai yang dijadikan tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan setelah mencari ikan di laut. Selain itu, di Pulau Pasaran terdapat beberapa usaha yaitu 19 warung kebutuhan konsumsi dan 4 toko besi kecil. Warung dan toko kecil yang dibuka oleh masyarakat di Pulau Pasaran ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumahtangga dan kebutuhan nelayan untuk melaut. Adanya warung dan toko kecil ini, memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan karena tidak perlu lagi membeli makanan atau barang kebutuhan ke pasar yang letaknya cukup jauh yang ditempuh dengan kendaraan bermotor.

Salah satu usaha mikro sebagai sarana penunjang perekonomian yang berada di kawasan Pulau Pasaran yang dikelola oleh Koperasi ISM Mitra Karya Bahari ialah Warung Serba Ada (Waserda). Waserda yang dikelola

oleh koperasi diharapkan dapat membantu para nelayan di Pulau Pasaran, khususnya yang tergabung sebagai anggota koperasi. Waserda menyediakan berbagai macam kebutuhan nelayan untuk menjalankan usahanya seperti jaring ikan, paranet, sarung tangan, tali tambang, mata pancing, cat kapal, senar, timah pancing, waring, garam, dan lain-lain. Keberadaan Waserda di Pulau Pasaran membantu para nelayan khususnya yang menjadi anggota koperasi karena harga di Waserda relatif lebih rendah dibandingkan dengan toko besi kecil lainnya yang juga menyediakan kebutuhan para nelayan.

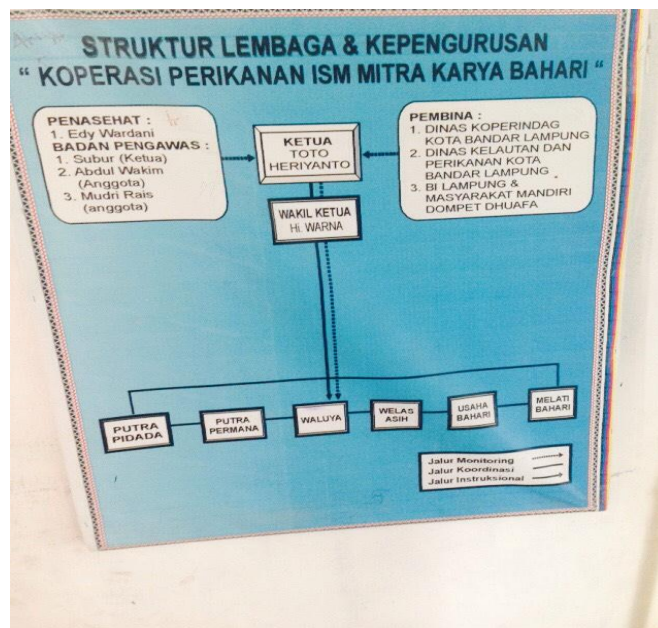
D. Keadaan Umum Koperasi ISM Mitra Karya Bahari

1. Sejarah Koperasi

Proses pembentukan dan pendirian Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada dasarnya tidak terlepas dari peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Lampung. KPw BI Provinsi Lampung mengawali proses pendampingan pada pengolah ikan di Pulau Pasaran. Tahapan pembentukan Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari diawali dengan adanya musyawarah bersama antar masyarakat Pulau Pasaran peserta program klaster perikanan yang diadakan pada bulan April 2011 lalu. Setelah diadakannya program tersebut, maka muncullah kesepakatan untuk membentuk sebuah koperasi di Pulau Pasaran.

Pada saat awal pembentukan koperasi terdapat 6 kelompok yang bergabung dengan jumlah anggota seluruhnya sebanyak 51 orang. Melalui

beberapa tahapan kegiatan, maka pada tanggal 21 Juli 2011 Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari disahkan sebagai lembaga formal yang dibuktikan dengan penerbitan badan hukum dari notaris dan surat pengesahan dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan Nomor Badan Hukum : 15/BH/X.9/VII/2011. Latar belakang usaha anggota koperasi juga cukup beragam seperti pengolah ikan, nelayan, pedagang dan kelompok produk turunan ikan. Pada tahun 2015 ini tercatat anggota koperasi sebanyak 136 orang. Gambaran struktur organisasi pengurus Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada saat pertama kali terbentuk dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, tahun 2011.

Struktur organisasi di atas diisi oleh nama-nama percentus berdirinya Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari. Susunan nama-nama percentus sekaligus pengurus pertama kali Koperasi Perikanan ISM Mitra

Karya Bahari didapatkan dari hasil musyawarah para nelayan yang telah bersedia bergabung menjadi anggota koperasi. Anggota koperasi pertama kali terdiri dari empat kelompok nelayan penangkap ikan, yaitu Kelompok Putra Pidada, Putra Permana, Waluya, Welas Asih dan dua kelompok pengasin ikan, yaitu Kelompok Usaha Bahari dan Melati Bahari. Susunan pengurus Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari pada tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Susunan pengurus Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari tahun 2011

| | |
|---|---|
| Nama Koperasi No Badan Hukum Tanggal Terbit Badan Hukum Jumlah Anggota Jumlah Simpanan Anggota | Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari 15/BH/X.9/VII/2011 21 Juli 2011 51 orang Rp 6.100.000,00 |
| Susunan Pengurus: Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Penasehat | Toto Heriyanto Hi. Warna Dasuki Suhaidi Rosidin Edy Wardani |
| Badan Pengawas: Ketua Anggota Anggota Pembina | Subur Abdul Wakim Mudri Rais a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung c. Dinas Kelautan dan Perikanan Bandar Lampung d. Karya Masyarakat Mandiri e. Universitas Lampung (UNILA) f. Universitas Bandar Lampung (UBL) |

Sumber: Laporan pertanggungjawaban Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, 2011 (tidak dipublikasikan).

2. Struktur Organisasi Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari

Rapat anggota tahunan (RAT) Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari terakhir dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2015 bertempat di aula koperasi, yang dihadiri oleh 136 nelayan anggota Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, terdiri dari kelompok usaha antara lain kelompok penangkap ikan (nelayan) baik yang menggunakan bagan ataupun yang menggunakan pancingan, kelompok pengolah ikan tangkap (pengasin ikan) yang sudah terpecah menjadi kelompok ibu-ibu pengolah produk turunan teri, dan kelompok buruh. Berdasarkan berita acara hasil rapat anggota tahunan pada tahun 2015 diperoleh kesepakatan, yaitu:

- a. Anggota menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun Buku 2014.
- b. Anggota menyetujui susunan kepengurusan Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari periode tahun 2015 - 2019, yaitu:

Ketua : Bapak Hi. Baskara

Wakil Ketua : Bapak Sohari

Sekretaris I : Bapak Subur

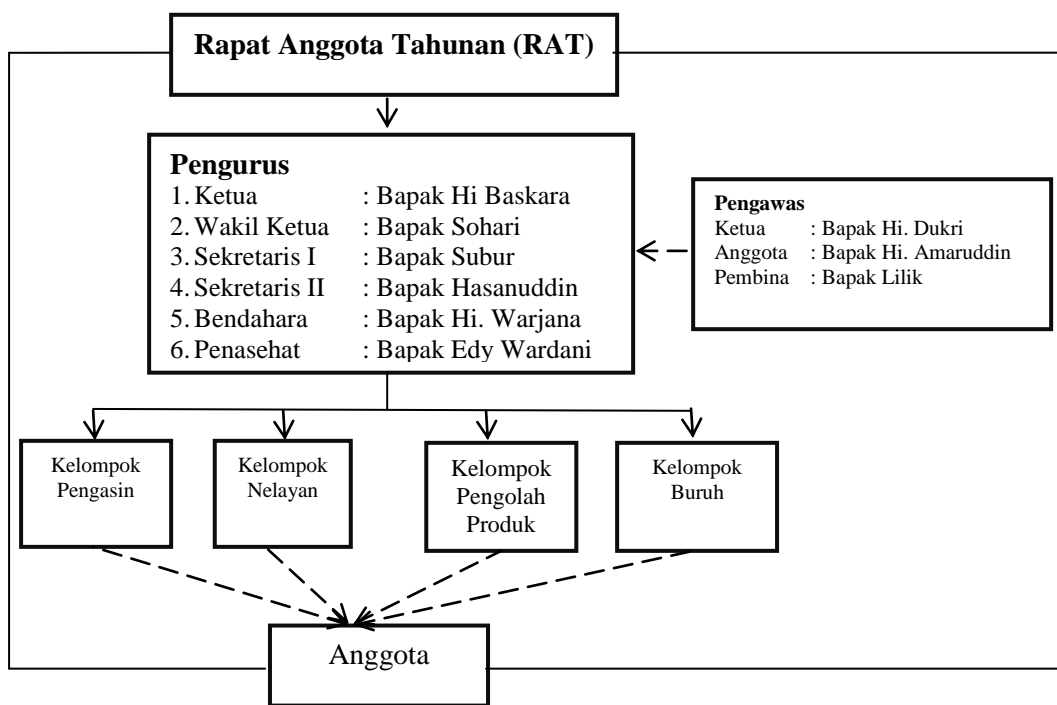
Sekretaris II : Bapak Hasanuddin

Bendahara : Bapak Hi. Warjana

Penasehat : Edy Wardani
- c. Anggota menyetujui susunan badan pengawas Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari periode tahun 2015 – 2019, yaitu:

Ketua : Bapak Hi. Dukri
 Anggota : Bapak Amarrudin
 Pembina : Bapak Lilik

Pada Gambar 5 sebelumnya telah diperlihatkan bahwa struktur organisasi tertinggi pada Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan sarana pengambilan keputusan untuk menentukan pengurus beserta badan pengawas dari Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari. Struktur Organisasi terbaru yang sekarang bertugas mengurus koperasi dapat dilihat pada Gambar 7.



Sumber : Laporan pertanggungjawaban Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, 2015 (tidak dipublikasikan).

Gambar 7. Struktur organisasi Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung, periode tahun 2015 – 2019.

Badan pengawas mempunyai peranan sebagai pengarah, pembimbing, dan pembina pada setiap kegiatan koperasi. Pengurus dibantu oleh kepala kelompok usaha yang berperan sebagai penggerak setiap kelompok usaha koperasi. Berikut kelompok usaha yang tergabung dalam Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari adalah sebagai berikut:

a. Kelompok pengolah ikan tangkap (pengasin ikan)

Merupakan kelompok yang mengolah hasil tangkapan ikan untuk dijadikan ikan asin. Ada yang ikannya berasal dari hasil tangkapan sendiri ada pula yang berasal dari membeli dari nelayan yang melaut.

b. Kelompok penangkap ikan (nelayan)

Merupakan nelayan yang menggunakan bagan ataupun yang menggunakan pancingan untuk mendapatkan ikan.

c. Kelompok ibu-ibu pengolah produk turunan ikan

Merupakan kelompok yang tergabung dari para ibu rumah tangga (istri dari nelayan) yang mengolah hasil tangkapan ikan menjadi produk turunan seperti kerupuk ikan, peyek ikan, dan bakso ikan

d. Kelompok buruh

Buruh yang dimaksudkan disini ialah buruh nelayan atau buruh melaut. Para kelompok buruh ini biasanya tidak mempunyai kapal sehingga menjadi buruh angkut barang dari kapal yang mengangkut barang atau buruh panen ikan di bagan.

3. Unit Usaha Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari

Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari sekarang hanya memiliki satu unit usaha, yaitu unit usaha warung serba ada (Waserda). Unit usaha tersebut merupakan unit usaha yang berbentuk penyediaan sarana produksi ikan tangkap atau diutamakan disediakan untuk para nelayan dan pengolah ikan. Berikut dokumentasi Waserda Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari.



Gambar 8. Waserda Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari.

Unit usaha warung serba ada ini terletak di kantor Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari dengan nama “Waserda Bahari”. Waserda Bahari yang dimulai sejak berdirinya koperasi ini menyediakan sarana produksi ikan tangkap yang dibutuhkan oleh para nelayan dan pengrajin ikan asin serta kebutuhan lain yang dibutuhkan masyarakat di Pulau Pasaran. Keberadaan Waserda ini sangat memudahkan nelayan untuk

memenuhi kebutuhan produksi melaut para nelayan dan harganya yang lebih murah juga sangat membantu menambahkan keuntungan untuk para nelayan.

Unit usaha ini dipandang kurang efisien untuk Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari, karena banyaknya nelayan yang menunggak pembayaran pembelian alat-alat produksi. Hal ini berarti, koperasi belum mampu mengelola Waserda dengan baik karena modal koperasi yang dimasukkan untuk membangun waserda belum memberikan keuntungan untuk koperasi tersebut, tetapi malah sebaliknya menimbulkan kerugian untuk koperasi karena banyaknya nelayan yang menunggak pembayaran pembelian.

E. Keadaan Umum Ketahanan Pangan Nelayan

Survei Konsumsi Pangan Provinsi Lampung tahun 2007, 2008, dan 2009 yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, diketahui bahwa jumlah dan Tingkat Konsumsi Energi (TKE) rumah tangga perikanan di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari 1.815,1 kkal/kap/hari atau sebesar 93,1% pada tahun 2007 menjadi sebesar 1.666,4 kkal/kap/tahun atau sebesar 84,0% tahun 2008, dan turun lagi menjadi 1.568,0 kkal/kap/hari atau sebesar 75,1% tahun 2009.

Sulitnya pemerintah untuk mengurangi laju pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya di Indonesia menyebabkan makin sulitnya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan penduduk, khususnya

nelayan yang tinggal di Pesisir Pantai Teluk Betung. Luas Pulau Pasaran yang terbatas dan lahan yang sudah dipenuhi oleh rumah penduduk menyebabkan tidak memungkinkan untuk dibangunnya pasar untuk menunjang pangan rumahtangga nelayan. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh nelayan di Pulau Pasaran masih kurang jika dibandingkan dengan keadaan di tengah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut menyebabkan masyarakat di Pulau Pasaran sedikit kesulitan melakukan pendistribusian hasil panen ikan, tetapi sarana jembatan yang tersedia menurut masyarakat disana sudah sangat membantu untuk akses pendistribusian atau jalur masuk pangan kedalam wilayah Pulau Pasaran. Letak pasar yang tidak jauh jika dilalui lewat jembatan tersebut tidak menjadi masalah untuk para rumahtangga nelayan memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Lemahnya pemberdayaan yang didapat nelayan di Teluk Betung khususnya Pulau Pasaran yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan menyebabkan masih sebagian besar tingkat ketahanan pangan nelayan dalam keadaan rendah. Badan Ketahanan Pangan tahun 2011 menyebutkan sebesar 43,14 persen tingkat ketahanan pangan rumahtangga nelayan di Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung masih dalam kriteria rawan pangan, hal tersebut dikarenakan masih kurang pengetahuan masyarakat akan kualitas pangan yang mereka konsumsi. Para nelayan belum paham makanan apa saja yang seharusnya mereka penuhi untuk rumahtangganya. Jika sekarang ini yang mereka pahami ialah makanan yang mereka konsumsi hanyalah cukup enak dan

mudah didapatkan, maka pemberdayaan haruslah dilakukan agar para rumahtangga nelayan paham bahwa makanan yang mereka konsumsi haruslah baik kualitas dan mutunya. Keadaan pasar yang sudah cukup baik dan pendistribusian pangan yang sudah lancar, akan meningkatkan tingkat ketahanan pangan nelayan Pulau Pasaran apabila konsumsi pangan rumahtangga sudah benar dan tepat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Pendapatan usaha ikan tangkap nelayan berbeda-beda besarnya setiap musim. Pendapatan usaha nelayan anggota koperasi pada musim barat sebesar Rp30.674.285,71, musim normal sebesar Rp35.872.857,14, dan musim timur sebesar Rp37.700.000,00. Pendapatan usaha nelayan non anggota koperasi pada musim barat sebesar Rp30.313.333,33, musim normal sebesar Rp32.580.000,00, dan musim timur sebesar Rp35.303.333,33.

Pendapatan usaha nelayan anggota lebih besar dibandingkan pendapatan usaha nelayan non anggota, oleh karena itu status keanggotaan koperasi berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan usaha nelayan.

2. Keberadaan usaha koperasi memberikan kontribusi untuk mensejahterakan anggotanya dapat dirasakan oleh para nelayan anggota koperasi dengan adanya perbedaan harga beli input produksi usaha nelayan antara nelayan membeli didalam koperasi atau waserda dengan nelayan membeli diluar koperasi atau pasar. Besar rata – rata pendapatan rumah tangga yang diterima dari manfaat ekonomi tunai sebesar Rp90.000,00 per tahun dan

rata – rata pendapatan rumahtangga yang diterima dari manfaat ekonomi diperhitungkan sebesar Rp1.035.637,14.

3. Total pendapatan rumahtangga anggota koperasi yaitu sebesar Rp31.752.000,00 per tahun lebih besar dibandingkan total pendapatan rumahtangga non anggota koperasi yaitu sebesar Rp23.226.426,67 per tahun. Total pendapatan anggota koperasi lebih besar karena dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang didapatkan oleh nelayan yang berstatuskan anggota koperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa status keanggotaan berpengaruh nyata terhadap tingkat pendapatan rumahtangga nelayan.
4. Ketahanan pangan nelayan diukur secara subyektif dengan menggunakan tiga parameter yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan dan aspek konsumsi pangan dengan secara keseluruhan menunjukkan sebesar 57,14 persen nelayan anggota yang baru mengatakan bahwa pangan mereka baik dan sisanya sebesar 42,86 persen masih berpersepsi tingkat pangan rumahtangga mereka masih rendah, sedangkan sebesar 50 persen untuk nelayan non anggota koperasi memberikan persepsi penilaian kepada ketahanan pangan rumah tangganya masih dalam keadaan rendah.
5. Faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan nelayan adalah variabel pendapatan usaha nelayan (X_1) dan pendapatan lain-lain (X_2). Adapun variabel yang tidak berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan nelayan adalah variabel manfaat ekonomi koperasi (X_3) dan status keanggotaan (D_1), kedua variabel bebas ini berhubungan erat, manfaat

ekonomi akan didapat jika menjadi anggota koperasi maka jika status nelayan non anggota maka manfaat ekonominya nol atau tidak ada. Kedua variabel bebas ini tidak berpengaruh pada tingkat ketahanan nelayan karena nyatanya keberadaan koperasi masih belum membantu para nelayan meningkatkan pangan disana. Satu unit usaha yang disediakan oleh koperasi tidak cukup membantu meningkatkan ketahanan pangan nelayan.

B. Saran

1. Bagi pihak Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari diharapkan koperasi menambah unit usaha di dalam kegiatan koperasi seperti unit usaha simpan pinjam dan pemasaran produksi untuk usaha nelayan, karena dengan adanya unit usaha tersebut koperasi dapat lebih menyejahterakan anggotanya dan koperasi menjadi lebih berkembang.
2. Bagi nelayan sekitar Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari yang belum bergabung dengan koperasi disarankan untuk bergabung, karena dengan menjadi anggota koperasi akan lebih memudahkan nelayan untuk mendapatkan input produksi untuk usahanya.
3. Bagi Badan Ketahanan Pangan diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan nelayan di Pulau Pasaran sampai ke tingkat individu, karena berdasarkan penelitian secara keseluruhan tingkat ketahanan pangan nelayan masih rendah jika dilihat dari ketiga aspek, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek distribusi pangan, dan aspek konsumsi pangan.

4. Bagi peneliti lain diharapkan agar meneliti pengeluaran rumahtangga pada bagian tingkat ketahanan pangan, karena penelitian ini meneliti secara subyektif untuk tingkat ketahanan pangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ancok, D. 1989. *Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Dalam Metode Penelitian Survei*. Diedit oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. LP3ES. Jakarta.
- Arifin, B. 2004. *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*. Buku Kompas. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2013. *Sinkronisasi Desa Mandiri Pangan*. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta.
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. 2015. *Peringatan Dini (Early Warning) Gelombang Tinggi*. Bidang Informasi Meteorologi Maritim. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Rata-rata Konsumsi Kalori (Kkal) per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan 2011-2013*. Badan Statistik Indonesia. Jakarta. <http://www.bps.go.id/Diakses> 8 Mei 2015.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2002. *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan*. Pusat Penyuluhan Pertanian. Jakarta.
- Dewan Ketahanan Pangan. 2003. *Strategi Kebijakan Pemenuhan Protein Ikan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional*. Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. 2013. *Rekapitulasi Data Berdasarkan Provinsi*. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Dinata AS, DAH. Lestari, H. Yanfika. 2014. Peran Koperasi Simpan Pinjam Tani Makmur Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Petani Jagung di Desa Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIIA*. 2 (3).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Keempat*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

- Gusti JAI, D. Haryono, FE. Prasmatiwi. 2013. Pendapatan Rumah tangga Petani Kakao di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. *JIAA*. 1 (4). 280-281.
- Hardinsyah, H. Riyadi dan V. Napitupulu. 2012. *Kecukupan Energi, Protein, Lemak dan Karbohidrat*. Makalah Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X. Jakarta.
- Harper, BJ. 1986. *Pangan, Gizi dan Pertanian*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hendar. 2010. *Ekonomi Koperasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Hendrik. 2011. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Pedayun Kabupaten Siak Provinsi Riau. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*. 1 (16). <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPK/article/view/44>/Diakses 27 April 2015.
- Indriani, Y. 2015. *Buku Ajar Gizi dan Pangan*. Aura Publishing. Bandar Lampung.
- Kasto, HS. 1996. *Profil Kependudukan Indonesia*. UGM. Yogyakarta.
- Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. 2006. *Buku Profil Kelautan dan Perairan Lampung*. Kantor Dinas. Lampung.
- Kantor Kecamatan Teluk Betung. 2012. *Laporan Profil Kecamatan Teluk Betung Timur dalam Angka*. Kantor Kecamatan. Bandar Lampung (tidak dipublikasikan).
- _____. 2012. *Monografi Pulau Pasaran*. Kantor Kecamatan. Bandar Lampung (tidak dipublikasikan).
- Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari. 2011. *Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari*. Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari. Bandar Lampung.
- _____. 2015. *Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari*. Koperasi Perikanan ISM Mitra Karya Bahari. Bandar Lampung.
- Laisa DD, WD. Sayekti, A. Nugraha. 2013. Analisis Harga Pokok Produksi dan Strategi Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Teri Nasi Kering di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. *JIAA*. 1 (2).
- Lubis, SM. 2010. *Pengaruh Koperasi dalam ketersediaan Sarana Produksi dan Penyuluhan Terhadap Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Langkat*

Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. Medan.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22801/8/Cover.pdf>
/Diakses 27 April 2015.

- Mahasari K, DAH. Lestari, Y. Indriani. 2014. Kesejahteraan Rumah Tangga Pengolah Ikan Teri Asin di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. *JIIA*. 2 (2).
- Mantra, IB. 2004. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mosher, AT. 1987. *Menciptakan Struktur Pedesaan Progresif*. Yasaguna. Jakarta.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Muhidin, SA. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Pustaka Setia. Bandung.
- Mulyadi, S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Munker, H. 1990. *Toward Adjusted Patterns of Cooperatives in Developing Countries*. Bonn
- Nasution, S. 1990. *Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nilasari, A. 2012. Analisis Hubungan Antara Pendapatan dengan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Kecukupan Gizi Rumah Tangga Petani di Kabupaten Cilacap. Fakultas Pertanian. Semarang.
<http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Ayu-Nilasari.H0808080.pdf>/Diakses 27 April 2015.
- Pakpahan, A dan E. Pasandaran. 1990. *Keamanan Pangan, Tantangan dan Peluangnya*. Prisma 2. Bandung.
- Prayitno, H dan L. Arsyad. 1987. *Pendidikan Desa dan Kemiskinan*. BPFE. Yogyakarta.
- Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. 2004. *Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Pedesaan: Konsep dan Ukuran*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Rangga, KK. 2014. *Keefektifan Kelompok Afinitas Usaha Mikro dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Mandiri Pangan Provinsi Lampung*. Disertasi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sajogyo. 1997. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. LPSB IPB. Bogor.

- Sinaga, AR. 2015. Ketahanan Pangan Pada Keluarga Miskin di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 4 (1). [http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/Diakses 27 April 2015](http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ceress/Diakses%2027%20April%202015).
- Sitio, A dan H. Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Soekartawi. 1995. *Analisis Usahatani*. UI-Press. Jakarta.
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono, 2011. *Statistik untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Suekirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suhardjo. 1996. *Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga*. Makalah Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20-30 Mei 1996. Yogyakarta.
- Widarjono, A. 2010. *Analisis Statistika Multivariat Terapan*. Edisi Pertama. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wirartha, IM. 2005. *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Yuliana P, WA. Zakaria, R. Adawiyah. 2013. Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. *JIA*. 1 (2). 184-185.